

**PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDRAGIRI HILIR  
(Ditinjau Dari UU Nomor 9 Tahun 1990)**

**TESIS**



Oleh :

**ZULFIKAR**

Nomor Mhs : 05912043  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2008**

**PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDRAGIRI HILIR  
(Ditinjau Dari UU Nomor 9 Tahun 1990)**

**TESIS**

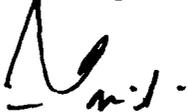
Oleh :

**ZULFIKAR**

Nomor Mhs : 05912043  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si.

Tanggal .....

Pembimbing II



Drs. Muntoha, S.H.,M.Si.

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal .....

**PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDRAGIRI HILIR  
(Ditinjau Dari UU Nomor 9 Tahun 1990)**

**TESIS**

Oleh :

**ZULFIKAR**

Nomor Mhs : 05912043  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 6 Maret 2008 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

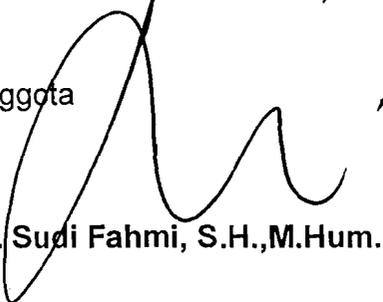
Ketua



Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H. M.Si

Tanggal .....

Anggota



Dr. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.

Tanggal .....

Anggota



Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal .....

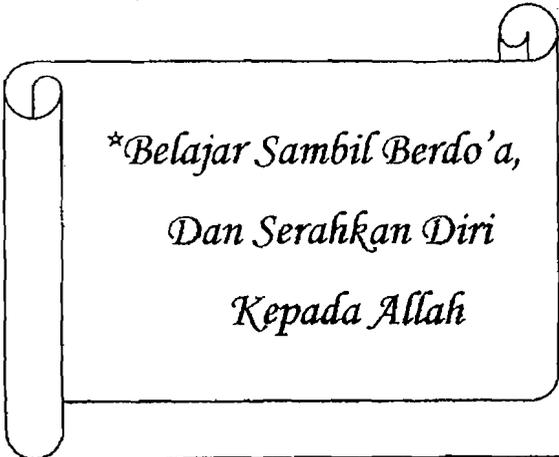
Mengetahui  
Ketua Program



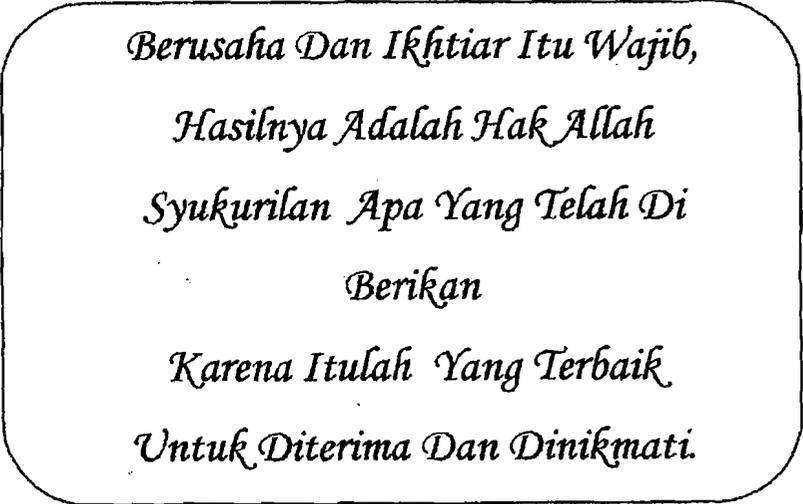
Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal .....

## MOTO



*\*Belajar Sambil Berdo'a,  
Dan Serahkan Diri  
Kepada Allah*



*Berusaha Dan Ikhtiar Itu Wajib,  
Hasilnya Adalah Hak Allah  
Syukurilan Apa Yang Telah Di  
Berikan  
Karena Itulah Yang Terbaik  
Untuk Diterima Dan Dinikmati.*

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, bahwa saya tulisan ini dapat diselesaikan, walaupun masih banyak terdapat kelemahannya. Oleh karena itu Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada :

1. Bunda tercinta karena telah mendo'akan dengan selamat dapat menyelesaikan tugas ini.
2. Istri dan anak-anak tercinta yang telah mendorong dalam proses penulisan sampai dengan selesai.
3. Seluruh anggota keluarga jauh dan dekat yang telah merestui penulisan ini.
4. Seluruh sahabat dan kawan yang telah membantu penulisan ini.
5. Pemerintah Daerah yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini.
6. Semoga Allah menyertainya.

Tembilahan, 12 Desember 2006

Penulis,

## KATA PENGANTAR

Dengan Melapahkan Bismillahirrahmanirrahim Tulisan dimulai semoga dapat menenangkan buah ppikir yang jernih untuk membangun Danau Tanjung Bakung sebagai salah satu aset daerah yang sangat tinggi keindahannya dalam menunjang pariwisata daerah Inhil khususnya.

Sungguh kita rasakan, bahwa masyarakat inhil sampai saat ini belum ada objek wisata yang dapat dihandalkan ditingkat Regional maupun Nasional dengan ditemukannya Danau ini diharapkan dapat meningkatkan peran Daerah Inhil dalam mengembangkan objek wisata andalan di Negeri Bumi Sri Gemilang Daerah Seribu Parit sebagai gerbang Propinsi dalam bagian Selatan.

Secara Geogafis Danau ini letaknya sangat strategis sekali dalam menghubungkan ke objek wisata lain yang ada di Inhil dan juga dekat sekali dengan industri Pulau Burung dan Batam. Dengan demikian kemudahan akses majunya Danau tersebut diharapkan menggesa lajunya perkembangan wisata danau ini.

Semoga Thessis ini dapat memberikan makna yang positif bagi Daerah dan warga masyarakat Inhil.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN BERITA ACARA PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II    TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN.....</b>	<b>24</b>
A. Tujuan Negara.....	24
B. Fungsi Negara .....	27
C. Perkembangan Teori Kenegaraan.....	29
D. Tujuan dan Fungsi Negara Republik Indonesia .....	41

BAB III	PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
	.....	46
A.	Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 09 Tahun 1990	46
B.	Pendekatan konstitusional	48
C.	Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	51
D.	Deskripsi Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir	111
E.	Pengembangan Pariwisata Indragiri Hilir	120
F.	Strategi	121
G.	Analisis Lingkungan Eksternal	122
H.	Analisis Lingkungan Internal	125
I.	Strategi	122
J.	SOT Kantor	125
BAB IV	PENUTUP	130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	133

## DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN BAGAN

1. TABEL 1.1	
JADWAL PENELITIAN LAPORAN AKHIR .....	26
2. GAMBAR 3.6	
PETA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.....	103
8. TABEL 3.7	
DAFTAR KECAMATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR .....	104
4. TABEL 3.8	
POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2004.....	116
5 TABEL 3.9	
PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 1999/2004 .....	118
7 TABEL 3.10	
CADANGAN BAHAN GALIAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.....	119
8 TABEL 3.11	
BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT AGAMA YANG DIANUT BERDASARKAN DATA TAHUN 2000/2004 ..	138
9 TABEL 3.12	
KEADAAN FASILITAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DATA TAHUN 2004 .....	139
10 TABEL 3.13	
JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH ANGKATAN KERJA, JUMLAH KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 1999 – 2004 .....	142
11. TABEL 3.14	
TINGKAT PERKEMBANGAN KESEMPATAN KERJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 1999 – 2004.....	143
12. TABEL 3.15	
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 1999 – 2004.....	143

13. TABEL 3.16	
KEADAAN PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN	
INDRAGIRI HILIR TAHUN 1999 – 2004.....	144
14. TABEL 3.17	
BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN TAHUN 1999 - 2004 DALAM	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR .....	148
15. TABEL 3.18	
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2001 .....	151
16. TABEL 3.19	
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2002.....	156
17. TABEL 3.20	
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2003.....	160
18. GAMBAR 3.1	
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN INDRAGIRI	HILIR139
19 TABEL 3.2	
DAFTAR NAMA HOTEL/LOSMEN.....	141
20 BAGAN 3.3	
RINGKASAN SWOT.....	151
21. BAGAN 3.4	
MATRIK SWOT PENGEMBANGAN PARIWISATA INHIL.....	154
22. BAGAN 3.5	
KERANGKA BERFIKIR .....	159

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Berdasarkan penelitian dan data empiris, banyak pakar dan analisis ekonomi mengatakan bahwa ekonomi pariwisata memiliki karakteristik yang menyebabkan sektor ini tetap dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia. Sektor ini relatif “kebal” terhadap resesi dunia, dan bersifat elastis terhadap peningkatan pendapatan, karena kecenderungan masyarakat untuk melakukan perjalanan terus meningkat. Perubahan pola kehidupan sosial mendorong manusia untuk melakukan perjalanan, baik untuk keperluan bisnis ataupun untuk berwisata.

Proyeksi WTO mengenai kedatangan wisatawan mancanegara di berbagai belahan dunia ataupun di Asia Pasifik juga memperlihatkan adanya peningkatan, khususnya di kawasan Asia Pasifik mencapai pertumbuhan yang tertinggi, yaitu 6,7 %.

Perubahan pola kehidupan sosial yang cenderung progresif untuk melakukan perjalanan dipengaruhi oleh beberapa factor dominan antara lain :

1. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan informasi dari belahan dunia lain secara cepat.
2. Terjadinya perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi, kemajuan tersebut membuat penduduk dunia mudah untuk berpergian keperjuru dunia secara cepat.
3. Pertumbuhan pasar bebas, baik ditingkat internasional, regional maupun nasional.

4. Revolusi dibidang pengolahan, perkembangan ini membuat waktu kerja lebih pendek, sehingga para pekerja mempunyai waktu berjalan lebih panjang.
5. Liberalisasi industri pariwisata.
6. Kemajuan teknologi dan liberalisasi keniagaan yang menjadikan pelayanan pariwisata menjadi lebih baik.
7. Keterbukaan politik.

Pariwisata merupakan salah satu asset nasional dari sector non migas yang potensial dan asset pariwisata ini selain bahan bakunya tidak akan habis. Juga merupakan asset yang berwawasan lingkungan karena pariwisata menampilkan kelestarian alam seperti pantai, sungai, hutan dan banyak keadaan alam lainnya.

Pembangunan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya membangun nasional. Manfaat dari pengembangan pariwisata dapat pula dirasakan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi, pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah dan diharapkan juga mampu menyemarakkan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai daerah tujuan wisata dunia. Dari segi politik, secara tidak langsung pariwisata dapat menunjang perdamaian dunia. Sedangkan dari segi sosial budaya pariwisata dapat memperkokoh kepribadian bangsa dan cita tanah air. Oleh karena itu, pariwisata dapat dikatakan sebagai katalisator pembangunan.

Potensi pariwisata dianggap cukup potensial sebagai salah satu komoditi pengganti migas yang perlu dibangun dan dikembangkan. Mengingat pendapatan dari sector migas seperti minyak bumi dan gas alam tidak mungkin dapat diandalkan secara terus-menerus. Sektor pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan sector-sector pembangunan lainnya. Pengaruh langsung yang dapat diperoleh adalah menambah devisa negara dan bagi daerah akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Selain itu pariwisata juga memberikan masukan yang nyata yaitu berupa perbaikan ekonomi bagi sebagian besar penduduk disektor lokasi wisata dengan terbukanya lapangan kerja baru, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pariwisata serta pelestarian kehidupan sosial dan budaya melalui kegiatan kebudayaan masyarakat yang memperoleh apresiasi.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 menjelaskan bahwa :

1. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya keluar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa.
2. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris, dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> TAP MPR Nomor : IV/MPR/1999

Pengembangan kepariwisataan didukung oleh sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Selain didukung sumber daya alam yang menarik, pengembangan kepariwisataan juga didukung oleh Pemerintah melalui peraturan yang melegalisasi kegiatan dengan tujuan agar seluruh potensi yang terkandung di dalamnya dapat diatur dan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah.

Masalah kepariwisataan memang telah menjadi pemikiran bagi bangsa Indonesia. Tekad pemerintah dan segenap rakyat Indonesia untuk memajukan pariwisata di tanah air tertuang dalam TAP MPR NO.IV/MPR/1999 tentang Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Bab IV, Pasal F, Bidang Sosial Budaya butir ke-20 sub butir H yang berbunyi : Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan criteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan amanat GBHN tersebut di atas, maka pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di setiap Kabupaten senantiasa merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya mengatur mengenai otonomi daerah. Kemudian menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal 3 yaitu :<sup>1</sup>

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990

2. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong pendayagunaan produk nasional.

Pengembangan bidang kepariwisataan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa pada umumnya dan pendapatan perkapita pada khususnya, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri lainnya. Misalnya dengan dibangunnya objek wisata pada suatu daerah maka akan bermunculan industri rumah tangga seperti kerajinan rakyat yang dapat dijadikan sebagai cenderamata bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut. Selain itu dengan dibangunnya bidang kepariwisataan dapat memperkenalkan dan mendayagunakan kebudayaan Indonesia serta dapat meningkatkan persaudaraan dan persahabatan nasional dan internasional.

Dalam konteks itu dapat dipahami bahwa pembangunan sektor pariwisata menuntut kesiapan Pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya ke arah pengembangan pariwisata di masa yang akan datang. Kesiapan yang dimaksud adalah dalam hal kelembagaan dan organisasional dalam bentuk pendirian Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, sarana dan prasarana pariwisata serta efektifitas pengembangan untuk masa yang akan datang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan nasional antara lain dengan membentuk

Lembaga Kepariwisata Nasional (National Tourism Organization). Adapun tugas lembaga tersebut menurut Oka A. Yoeti (1996:250) adalah :

- a) Melengkapi, mengadakan prasarana yang baik bagi pelayanan wisatawan.
- b) Membuat peraturan undang-undang yang berhubungan dengan pengurusan hati-hati yang berhubungan dengan kepariwisataan.
- c) Mendidik tenaga-tenaga yang terampil guna melayani macam-macam sector usaha kepariwisataan seperti : akademi, kursus-kursus, dan lain-lain.
- d) Mengeluarkan izin usaha untuk usaha-usaha kepariwisataan.
- e) Menetapkan klasifikasi kamar hotel dan akomodasi lainnya.
- f) Mengawasi, menertibkan dan menetapkan syarat-syarat pendidikan travel agent dan tou operator lainnya.
- g) Mengadakan pendidikan khusus tentang keterampilan pramuwisata (*guide*) serta mengeluarkan kartu pengenalnya.
- h) Merencanakan, mengembangkan, dan membina objek-objek pariwisata untuk menambah daya tarik suatu resort.
- i) Mempromosikan segala aspek kepariwisataan di dalam maupun di luar negeri.
- j) Membentuk *tourist information center* pada beberapa negara yang dianggap menguntungkan keperluan itu.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperbaharui dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004. Maka titik berat otonomi daerah adalah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota. Sedangkan Daerah Provinsi selain otonominya semakin kecil juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Jadi Pemerintah Kabupaten dan Kota berwenang mengelola asset wisatanya sendiri sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : "Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pada UU No 32 Th. 2004.

Dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, tentu daerah akan memiliki nilai strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bab V Pasal 6 yang menyebutkan bahwa :

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a) Hasil pajak Daerah
- b) Hasil retribusi Daerah
- c) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang disahkan.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Ini berarti bahwa Daerah berwenang mengelola kewenangannya sendiri termasuk dari sektor pariwisata. Jadi dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka

Daerah mempunyai wewenang untuk menggali segala potensi yang dimiliki oleh Daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau bagian Selatan yang sampai sekarang ini dapat dikatakan masih belum terjamah oleh pembangunan terutama bidang Kepariwisata. Padahal sebenarnya Kabupaten ini memiliki potensi wisata yang antara lain berupa sumber daya alam dan keindahan alamnya yang sangat menarik. Kabupaten Indragiri Hilir sangat potensial untuk dibangun dan dikembangkan dengan berbagai macam objek wisata seperti wisata pantai, wisata sungai, wisata pulau, wisata budaya, keanekaragaman flora dan fauna, wisata taman laut, dan berbagai hiburan rakyat yang akan menarik banyak wisatawan baik asing maupun domestik. Wisata Alam dan Danau Mangruf Kunang-kunang dan panorama.

Agar para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara banyak berkunjung, maka perlu dilakukan perbaikan dan pelestarian terhadap objek pariwisata antara lain melalui pelaksanaan manajemen dan pemberdayaan objek- objek pariwisata secara bertanggung jawab, serta pembenahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya.

Tersedianya objek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar dalam pengembangan pariwisata yang harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang serta usaha-usaha pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan. Karena semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

suatu daerah wisata, akan membuat semakin banyak wisatawan yang datang dan semakin lama pula mereka tinggal atau menginap pada daerah wisata.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang relatif baru dibentuk tahun 1965 dalam wilayah Propinsi Riau yang sangat potensial akan daya tarik wisatanya. Salah satunya adalah wisata bahari di Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun objek wisata yang mempunyai kegiatan di dalam dan permukaan laut ini merupakan kegiatan pariwisata yang baru berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir, namun sangat potensial untuk dimanfaatkan karena dapat menunjang sector pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun pada tingkat pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir. Di samping itu, akan menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Riau.

Permanfaatan objek wisata Indragiri Hilir diharapkan pula mampu mewujudkan pengelolaan pariwisata yang sehat dan lestari, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, meningkatnya peluang kegiatan ekonomi daerah, memperbesar penerimaan devisa dan pendapatan daerah, dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.

Konsekuensi dari hal ini adalah dituntut adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah terhadap pengembangan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, perlu diingat bahwa pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Karena itu, pengembangan akan tetap memperhatikan keawetan dan kelestarian objek wisata, sehingga objek wisata tersebut akan berkembang ke arah yang lebih baik.

Pembangunan objek wisata bukan hanya akan memperkenalkan Kabupaten Indragiri Hilir, namun juga akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan dibangunnya objek wisata tersebut orang akan mengenal Kabupaten Indragiri Hilir, terutama mengenal keindahan alam dan seni budayanya Indragiri Hilir.

## **B. Rumusan masalah**

Apabila potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak pernah diperhatikan maka dikhawatirkan potensi wisata yang mempunyai nilai ekonomis ini akan sia-sia saja tanpa ada usaha untuk memanfaatkan dan melestarikannya. Padahal dengan tersedianya potensi wisata tersebut sudah merupakan modal dasar dalam pengembangan pariwisata. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laju pembangunan di Kabupateen Indragiri Hilir.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pemanfaatan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hilir guna menjadikannya suatu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi yang baik ternilai harganya dan prospek masa depan bukan saja local tetapi juga regional Propinsi Riau. Untuk itu dilakukan penelitian dalam rangka pemanfaatan yang tepat berdasarkan potensi yang dimiliki dan kemudian

dikembangkan serta dipromosikan demi pembangunan daerah Kabupaten serta dipromosikan demi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Oleh karena itu yang menjadi focus penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Bentuk Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir apakah telah mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 ?
2. Bagaimana Peranan Wisata Bahari terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Hambatan apa saja yang dialami untuk mewujudkan peranan wisata bahari di danau Tanjung Bakong?
4. Uapaya-uapaya apa saja untuk mengatasi hambatan dimaksud?

Berdasarkan hal di atas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEPARIWISATAAN”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan Wisata Danau Tanjung Bakung dalam mendukung peningkatan sector pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui pengembangan pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untu mengetahui apa aja yang menjadi hambatan didalam mewujudkan peranan wisata bahari danau Tanjung Bakong.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilihat perbandingan antara teori dan kenyataan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kepariwisataan.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Kerja Kebudayaan Seni dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir guna penyusunan arah dan kebijakan menyangkut program pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah guna penyusunan arah dan kebijakan menyangkut program pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya objek wisata Danau Tanjung Bakung yang diharapkan dapat mengangkat dan memperkuat posisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah tujuan wisata di Propinsi Riau. Di samping itu, bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai bekal untuk melaksanakan tugas di daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Kebudayaan Seni dan Pariwisata.

#### **E. Metode Penelitian**

untuk memperoleh suatu kebenaran dengan penelitian, ada beberapa jenis metode yang dapat digunakan. Menurut Mardalis (1999: 24), metode diartikan sebagai "Suatu Cara atau teknis yang dilakukan dalam proses

penelitian dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta- fakta dan prinsip- prinsip dengan sabar, hati- hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran". Jadi metode penelitian adalah suatu teknis yang dilakukan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Pendapat lain yang dikemukakan Sugiyono (2004 : 1) bahwa<sup>1</sup> yang dimaksud dengan metode penelitian adalah "cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu". Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Dengan cara yang ilmiah itu, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang objektif, valid dan reliable. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama; valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek yang sesungguhnya; dan reliable berarti adanya ketepatan/keajegan/konsisten data yang didapat dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan itu maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat (2002:25) menyebutkan bahwa " Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat". Adapun Nazir (1999: 63) menyebutkan bahwa :

---

<sup>1</sup> Sugiono, 1998, dalam bukunya Metodologi Penelitian

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Pendekatan induktif menurut Bacon dalam Sapari (1983: 28), "Metode induktif memberikan cara agar manusia dalam memecahkan masalah problematik, mulai dengan mencari fakta- fakta yang nyata dan murni dari pengalaman dalam masyarakat, dari fakta-fakta itulah ditarik kesimpulan yang bersifat umum".

Dari berbagai pengertian tersebut maka penulis mencoba untuk memperoleh deskripsi mengenai pemanfaatan wisata Danau Tanjung Bakung dan memperoleh deskripsi mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **1. Populasi**

pengertian Populasi menurut Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat (2002: 72) adalah "keseluruhan dari unit analisis/ hasil pengukuran yang dibatasi oleh criteria tertentu.

Sedangkan menurut Komaruddin dalam Mardalis (1999 : 52), yang dimaksud "Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sample". Pada kenyataanya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu

- b. *Purposive Sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.
- c. *Cluster-quota sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dari wilayah tertentu sampai batas data yang diinginkan terpenuhi.
- d. *Snow-ball sampling*, yaitu peneliti memilih responden secara berantai.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari perangkat Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan pihak pengusaha wisata bahari. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* atau sampel bertujuan, jadi didasarkan pada tujuan yang diinginkan penulis. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang perangkat Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan 6 orang pengusaha Wisata Bahari di Kabupaten Indragiri Hilir yang dianggap representatif dari seluruh populasi.

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor	:	1	Orang
2. Kepala Seksi	:	1	Orang
3. Staf	:	3	Orang
4. Pengusaha Wisata Bahari	:	3	Orang
5. Kepala Desa	:	1	Orang
6. Staf Desa	:	2	Orang
		11	Orang
Jumlah Responden	:	11	Orang

### 3. Teknik Pengumpulan Data

berkaitan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu pengamatan langsung di lapangan dengan maksud memperoleh data yang sesungguhnya di lokasi penelitian.

Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan dialog langsung dengan sumber informasi yang representatif tentang seluk-beluk kejadian yang ingin diketahui oleh pewawancara.

Menurut Moleong (2000 :135), wawancara adalah "Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yang menurut Arikunto(1998 : 146) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Yaitu dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Metode wawancara ini dalam pelaksanaannya adalah wawancara terstruktur dengan cara bertatap muka langsung dengan responden kemudian diajukan beberapa pertanyaan seputar kegiatan wisata bahari dan dampaknya terhadap sector pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (1998 : 236), Metode dokumentasi yaitu "Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip ,buku,

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan wisata bahari Danau Tanjung Bakung yang dapat menunjang sektor pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini data diperoleh dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan transkrip tentang pariwisata yang diperoleh dari Satuan Kerja Kebudayaan Seni dan Pariwisata Indragiri Hilir.

Menurut Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2001 : 212) menulis "Pengumpulan data dengan obsevasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Arikunto (1998 :147) mengemukakan bahwa Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi yaitu :

1. Observasi non sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
2. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Penulis menggunakan pendekatan observasi non istematis dan pengamatan secara langsung di lapangan tanpa turut serta dalam melaksanakan kegiatan pada objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis

tidak terlibat langsung dalam pemanfaatan kegiatan wisata bahari di Desa Sungai Bela tetapi hanya mengamati secara langsung.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dimana suatu data dapat diperoleh berupa orang, dokumen atau aktivitas. Menurut Arikunto (2002 : 107) "Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh". Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Person*, yaitu sumber data berupa orang yang bias memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
  - a. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, sarana dan lain-lain.
  - b. Bergerak, misalnya aktivitas kerja, kinerja, laju kendaraan, kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian lain, maka *paper* bukan hanya terbatas pada kertas sebagaimana terjemahan terdiri dari kata *paper* tersebut, tetapi juga dapat berwujud batu, kayu, tulang,

daun lontar dan sebagainya yang dikira cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

Dengan demikian, data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari *Person* dan *Paper*. dan digunakannya *Place* sebagai sumber data dikarenakan dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis dapat pula menggunakan teknik observasi lapangan.

Fariad Ali (1997 : 35) mengemukakan bahwa "Sumber data berdasarkan jenis perolehannya terdiri atas data primer dan data sekunder".

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis kumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa daftar kuesioner dan daftar pertanyaan yang disebabkan pada perorangan sesuai dengan sasaran penelitian. Adapun perorangan yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari populasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat oleh sumber-sumber yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data ini bersumber dari instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ada sebelumnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Melalui analisis data akan terlihat manfaatnya terutama dalam proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian.

Nazir (1988 : 405) menyatakan bahwa “ Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Penulis menganalisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif, sehingga analisis data dilakukan sepanjang penelitian dilaksanakan. Diharapkan dengan cara ini dapat memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara utuh dan menyeluruh terhadap objek yang diteliti dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1988 : 129) sebagai berikut :

### *a. Reduksi data*

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci sambil dianalisis.

### *b. Display data*

Display data yaitu data yang diperoleh dibuat dalam bentuk table agar dapat dinilai gambaran secara menyeluruh, selanjutnya untuk mempermudah dalam pengambilan kesimpulan yang tepat.

c. *Mengambil Kesimpulan dan verifikasi*

Untuk mengambil kesimpulan dari setiap data yang diperoleh sejak semula kemudian dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut.

**6. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Kebudayaan Seni dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyelesaian laporan akhir. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Februari 2004, jadwal kegiatan penyusunan laporan akhir dapat dilihat dalam table 3.1 sebagai berikut :

**TABEL 3.1. JADWAL PENELITIAN LAPORAN AKHIR**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2003																							
		Nop.		Desenber				Januari				Pebruari				Maret				April					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penyusunan Dan pengajuan proposal																								
3.	Penelitian dan pengumpulan data																								
4.	Penyusunan laporan																								
5.	Pengesahan laporan																								
6.	Ujian kompetensi																								

Keterangan :

= Pelaksana Kegiatan

## **7. Sistematika Penulisan.**

Dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

### **Bab.I Pendahuluan :**

- Latar belakang masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Kegunaan Penelitian
- Metode Penelitian
- Sistematika Penulisan.

### **Bab II Teori Negara Kesejahteraan:**

- Tujuan Negara
- Fungsi Negara
- Berkembangnya Teori Kenegaraan.
- Tujuan dan Fungsi Negara Indonesia.

### **Bab.III Peranan Wisata Bahari “Danau Tanjung Bakong” terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU.No.9 Tahun 1990.**

- Tinjauan terhadap UU.No.9 Th.1990.
- Diskrepsi Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir.
- Konsep dan tujuan Pariwisata.
- Wisata bahari “Danau Tanjung Bakung” dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Bab.IV Penutup.**

- Kesimpulan.
- Saran-saran.

Daftar Bacaan dan Lampiran-lampiran.

## BAB II

### TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN

#### A. Tujuan Negara.

Seperti hal tentang memahami hakikat Negara, adalah sebagai tempat daripada suatu Negara untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Maka pemahaman tentang tujuan suatu Negara sangatlah penting, karena berkaitan dengan kemakmuran suatu bangsa adalah terletak pada komitmen suatu Negara sebagai tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu perlu ada kelengkapan suatu Negara, seperti sifat, fungsi dan bentuk suatu Negara.

Kemudian dari pada itu enggan mengetahui dari tujuan Negara, dapat menjawab masalah legitimasi kekuasaan suatu Negara, yaitu kekuasaan dari pada organisasi Negara, karena semuanya harus sesuai dengan tujuan Negara. Pada hal tentang tujuan Negara ini ada banyak sekali konsep para ahli kenegaraan secara umum bahwa seluruhnya berkisar untuk kepentingan masyarakat dan bangsa yang berdomisili di negara sebagai wadah organisasi.

Berbicara tentang tujuan Negara berkaitan dengan dengan tempat, keadaan dan waktu serta sifat daripada kekuasaan penguasa suatu Negara. Mungkin saja dalam kurun waktu ratusan tahun sebelumnya belum menjadi tugas dan tanggungjawab Negara tetapi dengan perkembangan saat ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Negara. Suatu pendapat dari Soehino, SH dalam bukunya "Ilmu Negarta" bahwa, Dalam beberapa abad yang lalu soal ini tidak menjadi tugas Negara, ingatkan azas ekonomi pada jaman liberal :laissez fairelaissez aller, tetapi soal ekonomi menjadi tugas Negara yang amat penting (Soehino, SH; 1986:148).

Oleh karena itu sedikit demi sedikit kita perlu tau apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan Negara?

"Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena Negara itu suatu organisasi kekuasaan dari pada

manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat Yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu, tiap-tiap Negara mempunyai tujuannya. Tujuan Negara bermacam-macam antara lain :

1. untuk memperluas kekuasaan semata
  2. untuk menyelenggarakan ketertiban hokum
  3. untuk mencapai kesejahteraan umum
- (Drs.C.S.T.Kansil,SH:1983:16).

Biar lebih berkembang pengetahuan tentang tujuan Negara, maka mari kita pelajari dari konsep beberapa para ahli kenegaraan tentang tujuan Negara:

1. Ajaran Plato: Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Oleh karena diajarkan pertama oleh Plato, maka disebut ajaran Plato.
2. Ajaran Negara Kekuasaan : Penganjur ajaran ini antarlain : Machiavelli dan Sang Yang. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata dan arena itu disebut Negara kekuasaan. Menurut ajaran ini orang mendirikan Negara itu maksudnya untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya.

Untuk mencapai kejayaan suatu Negara, maka rakyat harus rela berkorban dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan Negara. Rakyat disini mejadi alat yang dikorbankan untk perluasan kekuasaan, maka pada perinsip seperti ini biasanya terjadi pada Negara yang dictator militer.

Kemudian Sang Yang mengemukakan suatu pendapatnya: "A weak peple means a strng state mind a eak people." Jika orang menghendaki suatu Negara yang kuat dan berkuasa, maka rakyat harus dilemahkan dan dimiskinkan: Namun sebaliknya jika orang menghendaki raakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu akan menjadi lemah.(CST.Kansil,SH:1983:16).

3. Ajaran Theokratis(kedalatan Tuhan): Tujuan Negara itu untuk mencapai penghidupan danpenghidupan aman dan tenteram dengan taat kepada da dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin Negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan keuasaan Tuhan yang diberikankepadanya (Thomas Aquinus,Agustinus).
4. Ajaran Negara Polisi:Negara bertujuan ntuk mengatur semata-mata untuk keamanan dan ketertban dalam Negara(kant).
5. Ajaran Negara Hukum:Negara bertujuan menyelenggarakan ketertban hokum(Krabbe). Dalam Negara hokum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahanya didasarkan atas hokum . Semua orang tanpa kecuali harus tuduk dan taat kepada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara itu(Govemmet not by man,but by law=the rule of law). Apaun yang terjadi maka tidak lain hukumlah yang harus ditegakan,tanpa hukum Negara tidak akan aman dan tertib.

Dalam pandangan ini, bahwa rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sebdiri hanya menurut keinginannya yang bertentangan dengan kemauan hukum, atau rakyat dilarang melawan hukum atau hukum sendiri-sendiri. Hanya negaralah yang menetapkan hukum untuk memenuhi kehendak rakyat agar tertib dan aman. Kemudian didalam Negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara,sebaliknya rakyat berkewajiban pula mematuhi seuruh peratran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Negara itu.

6.Negara Kesejahteraan⊗Welfare State=Social Service Stat) : Tujuan Negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama,kemakmuran dan keadilan social bagi seluruh rakyat Negara itu.

Dalam Pembukaan Unang-undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa," Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umm dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarka perdamaian abadi dan keadilan social....."(UUD 1945).

Selain daripada itu ddalam penjelasan UUD 45 ditetapkan Negara Indonesia berdasakan atas hukum(Rechtsstaat). Dengan demikian semakin jelas bahwa, Negara membentuk suatu msyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan itu bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

## **B. Fungsi Negara**

Kendati secara umum terkesan sama, fungsi akan sangat diwarnai oleh siapa atau pihak mana yang paling berkepentingan atas keberadaan negara. Bagi negara kekuasaan (*power state*) fungsi negara adalah untuk dan demi kepentingan kekuasaan. Sebaliknya negara demokrasi, orientasi fungsi negara Diarahkan pada tujuan untuk mencapai negara sejahtera (*welfare state*). Jacobsen dan Limpan, dalam Political Science menyatakan bahwa fungsi negara dibedakan antara fungsi esensial, fungsi jasa, dan fungsi perniagaan.

### **2.1 Fungsi esensial**

Fungsi esensial adalah fungsi yang diperlukan demi terjaminannya eksistensi dan kelangsungan negara. Untuk menaksanakan fungsinya negara membutuhkan *ketertiban* dan *keamanan* umum. Untuk ini a.l memiliki alat negara kepolisian. Negara memerlukan kontinuitas pemasukan dana yang dengannya negara bisa membiayai dirinya sendiri melaksanakan pembangunan, untuk negara memiliki *lembaga perpajakan*. Negara memerlukan kepercayaan public akan adanya kepastian bahwa aturan/hukum negara yang bisa dilaksanakan, untuk itu negara memiliki *lembaga peradilan*. Negara membutuhkan jaminan rasa aman dari kemungkinan gangguan atau serbuan dari luar yang mengancam kedaulatan negara, untuk itu negara perlu memiliki angkatan perang sebagai alat pertahanan negara.

Diatas semua fungsi esensial negara adalah harus mampu menjamin, setidaknya memberikan sejauh mungkin kemudahan, bagi terselenggaranya pendidikan bagi setiap insan warga negara. Pendidikan adalah satu-satunya, untuk memperoleh sumber daya manusia berkualitas sebagai asset utama

bangsa dan paling berharga bagi negara. Dalam negara yang masih bernuansa negara kekuasaan umum terjadi mispersepsi atas makna dan arti pendidikan. Pendidikan diposisikan sebagai sekedar kebutuhan keluarga dan melalui menjadi tanggungjawab keluarga. Padahal pendidikan bukan sekedar tanggungjawab orang tua atau keluarga. Rakyat yang cerdas adalah kebutuhan negara. Hanya negara dengan sumber daya manusia (SDM) yang kuatlah yang mampu menjaga eksistensinya dalam mengarungi kancah pergaulan sekaligus persaingan antar bangsa.

*"...Today, the basis of the world's wealth is shifting from natural resources to advanced technology..."(Hendamin Danadireksa:2007:99).*

## **2.2 Fungsi jasa**

Untuk memelihara dan meningkatkan kehidupan dan taraf kehidupan warganya, negara dituntut untuk menyiapkan dan/atau meningkatkan sejumlah prasarana dasar yang melalui itu perekonomian negara dapat berjalan dengan baik. Membuka jalan, membuka jalur perintis penerbangan, dan pelayaran & angkutan laut, untuk lokasi terpencil; membuat dam untuk sistem pengairan dan pembangkit listrik, menyiapkan pelabuhan, dll, adalah sekedar contoh. Bagi negara yang berkembang yang rakyatnya belum memiliki kemampuan (finansial, manajemen, peralatan, dan teknologi) tugas, kewajiban, dan fungsi negara adalah sebagai regulator dan fasilitator atau dengan menyediakan sarana dan/ atau menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian rakyat secara sehat (menyediakan kredit murah, bimbingan teknis dan manajemen, membuka peluang pasar, UU anti monopoli, dll). Dalam hal ini negara menciptakan lapangan kerja baru terhadap tumbuhnya jasa-jasa industri sebagai mata air kehidupan masyarakat.

## **2.3 Fungsi perniagaan**

Pengalaman empirik negara-negara yang telah mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi adalah bahwa, lebih sedikit negara membuat aturan akan lebih normal jalannya perekonomian, artinya sesedikit

mungkin negara menempatkan diri sebaagia 'pengatur'. Fungsi perniagaan bagi negara lebih pengertian makro yakin bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian negara (PMA, PMDN), agar komoditas perdagangan mampu menembus dan mampu bersaing di pasar global. Tugas dan kewajiban negara, terlebih di era global, adalah menjaga keseimbangan neraca perdagangan, menjaga dan mengatur nilai tukar matauang, dan menjaga kecukupan cadangan devisa minimal untuk kurun waktu tertentu.

Pada fungsi ini negara lebih menjamin terjadinya arus perdagangan didalam negara, untuk menciptakan kehidupan bangsa yang adil dan kemakmuran dan sejahtera. Karena kesejahteraan masyarkat adalah kunci utama untuk sampai pada tingkat stabilitas negara. Dengan demikian negara berupaya menciptakan kondisi inpestasi perdagangan yang kondusif terhadap para npesto luar negeri.

### **C. Perkembangan Teori Kenegaraan**

Kapankah timbulnya Ilmu Negara (pemikiran tentang negara dan hukum) ? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara, negara adanya mendahului, jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada, kita ingat misalnya adanya negara-negara : Babylonia, Mesir dan Assyria. Negara-negara adanya sekitar abad ke XVIII sebelum Masehi, dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut.

Tetapi di samping itu pada jaman banggunya peradapan manusia ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak dari pada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babylonia yang bernama Chammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 SM yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah-belah.

Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adnya negara itu sendiri, lalu apakah

kiranyayang menyebabkan keadaan itu demikian ? keadaan demikianini dapat dijelaskan bahwa pada jaman Purba (kuno) raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaanya absolut, orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang tertentu itu berkuasa, sedang orang-orang lainnya tunduk, apa dasar kekuasaan penguasa itu dan lain sebagainya. Ketidak sempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas.

Tetapi meskipun demikian kita tidak boleh beranggapan bahwa pada jaman Purba itu belum ada ilmu, karena pada jaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematis. Karena pada jaman Purba itu segala pembicaraannya dicampuradukkan saja, misalnya suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini, terang belum ada. Pada jaman Purba itu, belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara. Sebab ini adalah suatu ilimuyang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguas pada jaman Purba itu merupakan penguasa yang kekuasaanya bersifat absolut, wenang menentukan hidup matinya seorang. Jadi menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriyah (keduniawian ), maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekan, melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum.

Jadi oleh karena ilmu kenegaraan itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa, dasar wewenang dari pada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu, baru dapat timbul dan berkembang bila susunan kenegaraannya, kemasyarakatannya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat.

Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara.

Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradapan, karena merupakan gejala sosial (gejala kemasyarakatan) yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradapan itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat ( di negara ), di mana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, secara kritis.

Keadaan itu, menurut sejarah kenegaraan, terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke V SM yaitu di Athena. Jadi bangsa Yunani kuno-lah yang pertama-tama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum, dus kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian apakah kiranya yang menyebabkan adanya keadaan demikian itu ? banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Adanya sifat-agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah ( kanon ).
2. Keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain.
3. Bentuk negaranya, yaitu Republik-Demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung-jawab sendiri.
4. Kesadaran bangsa Yunani sebagai satu kesatuan.
5. Semuanya itu ( nomor 1 sampai dengan 4 ) menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara.

Jadi dengan demikian berfikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada jaman Yunani kuno, yaitu di Milete salah satu kota di Yunani. Tetapi pada

waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat, dan perhatiannya pada mulanya ditujukan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditujukan pada masyarakat manusia dan segala suatu yang berhubungan dengan itu.

Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah raja pericles wafat pada tahun 429 SM di Athena mulai berkuasa radikalisme, demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang, dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah jaman filosof-filosof Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pimpinan, oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara, banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia-kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradapan Timur dan Yunani. Nama mereka, ialah kaum sofist, tetapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk, karena cara berpikir mereka.

Mereka mengukur segala-galanya pada diri sendiri, sehingga mereka memperbesar ketidakpastian dan mereka membenarkan setiap orang, sehingga obyektivitas sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang satu, tidaklah demikian untuk yang lain, sehingga dengan demikian pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan diperbesar, dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri.

Cara berpikir yang demikian, yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dengan rakyatnya di kerajaan-kerajaan Timur, bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani (Athena ) yang mencari pedoman-

pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka. Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno, yaitu Socrates, yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofist, mulailah berkembang kesadaran pikiran kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran obyektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum dan sebagainya. Ini semua akan dapat diketemukan, oleh karena suksma dan jiwa manusia merupakan bagian daripada alam semesta.

### **1. Jaman Yunani kuno**

Dengan sekedar uraian di atas sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara, maksudnya dengan cara bagaimanakah sesuatu yang disebut negara itu terbentuk, atau terjadi. Pemikiran ini telah di mulai juga sejak jaman Yunani kuno. Sarjana yang pertama mengarahkan pemikirannya ke arah itu adalah :

#### **1. Socrates. Meninggal pada tahun 399 SM**

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Di sinilah tersimpul pemikiran Demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menantang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati undang-undang.

Socrates meninggal, karena dipaksa (dihukum) minum racu, sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu, dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan.

Bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya termasyur yaitu Plato. Karena

Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya yaitu Socrates. Dalam banyak hal Plato bersifat tanya jawab, sedang jaweaban-jawaban itu diutamakan menurut ajaran gurunya, Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno.

Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadsinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit, yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang yang lain juga ingin hidup dengan aman, ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling benteng itu. Leh karena itu Polis dianggap identik dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identik dengan negara ( organisasi) yang masih berbentuk Polis itu.

Dengan demikian maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada jaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis. Yaitu :

1. Negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut Polis atau City State, negara Kota.
2. Persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah seruwet dan berbelit-belit seperti sekarang ini, lagi pada jumlah warga negaranya masih sedikit.
3. Setiap warga negara ( kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak belian) adalah negara minded, dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya.

## 2. *Plato*

Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 SM. Pada tahun 389 ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Academia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut. Dan selama itu pula ia banyak menulis buku, maka berlainan dengan gurunya, yaitu Socrates, Plato banyak

meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya-jawab, dan dalam percakapan itu gurunya, Socrates, selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian Socrates meskipun tidak dapat meninggalkan tulisan-tulisan apapun namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah : Politeia, atau Negara, buku ini membuat ajaran-ajaran Plato tentang Negara dan hukum, dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Nomoi, atau undang-undang. Ajaran-ajaran Plato tentang dan hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato dalam lapangan Filsafat, Plato adalah pencipta daripada ajaran alam-cita (ideeenleer), dan oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakekat kebenaran itu terdapat didalam jiwa manusia. Dengan ajaran inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang menerima paham adanya Alam tanpa benda, Alam serba cita. Dan pemikirannya atau ajarannya yang demikian itu timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum Sofist. Dengan demikian ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya dengan memulai panca indera itu sifatnya adalah sangat relatif, karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohaniiah.

Sekarang bagaimanakah ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara ? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato negara beraneka macam, yang menyebabkan mereka bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka.tentang hakekat negara, mengenai hal ini Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya,mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu, oleh karena negara itu sebetulnya pada hakekatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu.

Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, di dahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan, keadilan, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dan satu soal yang diajukan oleh Plato ialah : dapatkah orang jahat itu berbahagia ? karena meskipun dimana mana telah diajarkan tentang kesusilaan, kebijakan, keadilan, toh tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya.

Pemecahan soal yang diajukan Plato itu dapat dicari dan dikemukakan uraiannya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato ada lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Perubahan keadaan ini mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian ? sebabnya ialah bahwa sesungguhnya bentuk daripada suatu negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahan itu ditentukan sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan itu, selanjutnya sifat dari pada orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipiel. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah Aristokrasi;. Ini adalah bentuk negara dimana bentuk pemerintahan yang dipegang oleh para cerdik pandai dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan.

Tetapi sesuai dengan sifat-sifat jiwa manusia yang selalu berubah, pemerintahan ini tidak dapat bertahan lama., karena golongan yang memegang pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyuran dan kehormatan daripada keadilan. Maka apabila pemerintahan Aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum, dan tidak lagi berpedoman pada keadilan, karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari Aristokrasi menjadi Timokrasi. Sifat jiwa orang-orang yang memegang

pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya dan dengan berubahnya sifat pemerintahannya itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari Teakrasi menjadi Oligarki.

Dalam pemerintahan Oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang yang kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecendrungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum, setelah pemerintahan negara pindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan umum. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh masyarakat dan kepentingan umumlah yang diutamakan, dinamakan Demokrasi. Dalam pemerintahan Demokrasi ini prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan.

Sedangkan yang terjelek adalah Tyranni. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas, oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang Tyran sebagai makhluk yang peling berbahagia maka tampklah sebagai seorang penjahat sejati.

## **2. *Zaman Romawi kuno***

Berbeda dengan pada waktu Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu ini ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia.

Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 146 SM ditaklukan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik-beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi-konsepsi kenegaraan selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya, sedangkan konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibubukan, dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya.
2. Kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah perubahan dari Negara yang bersifat polis atau negara kota (city state), Romawi menjadi suatu Imperium (kerajaan dunia), yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah, yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali.

Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah Monarki atau kerajaan, yang meliputi berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintahan Monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum patricia (kaum ningrat). Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih demokrasi, yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patricia (kaum ningrat) dengan kaum Plebeia (kaum gembel, rakyat jelata). Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang, yang terkenal dengan

nama undang-undang 12 meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh dua orang konsul yang bersama-sama dengan dewan pemerintah menjalankan pemerintahan dan undang-undang.

### **3. Zaman Abad Pertengahan**

Di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476 yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi-Barat. Akan tetapi Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354-430. Sedangkan jatuhnya kerajaan Romawi Barat, yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi, baru terjadi setengah abad kemudian (dihitung dari tahun 476 tadi), yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh raja Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur.

Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaraannya, sedangkan sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus, dan kemudian menggantikannya. Karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini, maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum Gereja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan.

Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembangkan kepada asalnya yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian lenyaplah alasan yang kuat

bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah Kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan dan adapt-istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

#### **4. Zaman Renaissance (abad ke XVI)**

Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua, akhir zaman pertengahan sesudah perang salib. Jadi zaman renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan abad pertengahan bagian yang kedua sampai pada akhir abad ke XVI.

Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman renaissance. Sebab pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalistis, dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum. Segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri, karena ditentukan oleh pandangan yang teologis.

Akan tetapi mulai abad ke XII terjadilah perubahan-perubahan, karena filsafat nominalistis telah memutar balikan hubungan antara hal yang umum dan hal yang khusus. Dan mulai saat itu pula perhatian terhadap kehidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang. Akal manusia mulai menjiwai kehidupan, maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebajikan yang tertinggi, sekarang, pada zaman renaissance, hasil perseoranganlah, dimana orang lain tidak dapat melakukannya, mendapatkan pujian dan penghargaan yang tertinggi. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya meskipun dengan akal yang licik, tetap ditempuhnya.

## **2. Tujuan Pembangunan Nasional**

Dalam gerak pembangunan nasional dari tahun ketahun, adalah dalam rangka proses pencapaian keadilan dan kemakmuran yang merata diseluruh tanah air Indonesia baik moral maupun spiritual bangsa, dasar yang fundamentalnya adalah Pancasila dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Agar didalam lajunya proses pencapaian tujuan nasional agar tetap menjaga keharmonisan ,kesatuan dalam suasana kehidupan yang dinamis dan suasana lingkungan bangsa yang merdeka dan persahabatan bangsa yang kondusif.

## **3. Fungsi Negara Indonesia.**

### **(1). Perlindungan.**

Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia (Pemb.UUD 45). Didalam menjalani perlindungan untuk masyarakat,negara meneapkan sistem hukum didalam ketatanegaraan Indonesia untuk mengatur aktifitas masyarakat dan bangsa didalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara.Oleh karena itu Negara Indonesia disebut negara Hukum (Rechtsstaat) bukan sebaliknya (Machtsstaat).Yang dimaksud dengan negara hokum adalah bukan saja dalam arti formal yakni menjaga dan alat penindak bagi yang melakukan penyimpangan,melainkan hokum juga memberikan perlindungan terhadap bangsa dan Negara.

### **(2) Kesejahteraan.**

Negara memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia baik lahir maupun batin. Untuk kesejahteraan lahir, maka Negara melakukan perencanaan Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa.Adapaunyang menjadi tujuan utama dari mpembangunan adalah :”Untuk menumbuhkan sikap dan tekad

kemandirian manusia dalam masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras „adil dan merata” (Prof.Drs.H.A.W.Widjaya :2002:250). Program pelaksanaan pembangunan Nasional setiap tahun dilakukan dalam bentuk rencana operasional berupa Anggaran dan Belanja negara. Hasil pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan adil dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sedangkan untuk kesejahteraan batin, Negara memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk menganut kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Untuk menjamin hal yang demikian itu maka lahirlah Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana agama adalah hak yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia karena agama adalah anugrah yang diberikan oleh Allah.

(3) Motivasi.

Dapat dinyatakan bahwa motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang-orang yang lain dalam menghadapi situasi yang sama. Dan dapat juga orang akan lebih bersemangat didalam menghadapi sesuatu didalam situasi yang berbeda-beda. Bisa saja seseorang akan berkerja keras didalam mengejar sesuatu tujuannya yang ingin dicapai pada situasi tertentu, dan boleh jadi pada kasus yang sama dengan waktu yang berbeda kerja keras itu menjadi lemah. Oleh karena itu didalam melakukan sesuatu memang sangatlah memerlukan dorongan atau motivasi agar kerja seseorang semakin bergairah. Negara memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan aktifitas didalam meneruskan perjuangan hidupnya baik hidup berbangsa, bernegara dan peribadipun tetap negara memberikan sugesti agar masyarakat

terdorong lebih giat untuk berkerja. Seperti seseorang yang telah mendapatkan suatu pekerjaan dengan baik maka akan diberikan suprais (hadiah) sebagai penghargaan atas prestasinya.

Pemberian motivasi itu sangatlah penting, apalagi bagi seseorang yang berada dikelas meneer organisasi. Sasaran utama motivasi itu kepada meneer agar dapat mendistribusikan semangat kerja itu kepada seluruh staf, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Yang dimaksud dengan motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka mencapai tujuan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Prof. Dr. Sondang P. Siagian: 2004:138).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, nyatalah bahwa didalam mengaplikasikan sistem manajemen didalam suatu organisasi motivasi itu sangat diutamakan didalam menggerakan seluruh potensi organisasi untuk menapai tujuan tertentu. Dimana negara adalah sebuah organisasi besar yang harus menggerakan seluruh potensi untuk mencapai tujuan negara yang telah diamanatkan oleh pendiri negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 'Memajukan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan Kehidupan Bangsa berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial'.

#### (4) Pelayanan

Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sbagai akibat adanya usaha-usaha manusia dalam menggunakan peralatan (Ivancevich cs: dari buku Manajemen Pelayanan oleh Ratminto: 2005:2).

Menurut Gronroos bahwa pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih:2005:2).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktifitas kongkrit sebagai akibat dari yang keperluan antara yang dilayani dan memberikan pelayanan.

Masyarakat adalah pihak yang dilayani, sebagai pengguna jasa pelayanan, sedangkan negara adalah melayani atau memberikan jasa pelayanan. Suatu contoh ketika masyarakat menghendaki adanya sertifikat tanah, maka negara memberikan jasa untuk memberikan sertifikatnya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Bukan sebaliknya dimana negara minta dilayani kepada masyarakat didalam memenuhi keinginan masyarakat.

Motivasi mendorong orang untuk bersemangat untuk melakukan aktifitas. Semangat adalah suatu energi yang dapat menggerakkan pelaku sampai pada tingkat yang paling tinggi, dan sebaliknya bila tidak bersemangat tentu habis energi dan dapat membawa orang pada tingkat yang serendah-rendahnya. Yang paling terkait dengan semangat adalah kebutuhan sesuatu, bila kebutuhan telah dapat terpenuhi sebagian besar motivasi akan timbul untuk bergerak melakukan sesuatu. Selain kebutuhan juga kesadaran internal seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan dengan rasa tanggungjawab atau tidak. Adanya rasa sadar akan tugas dan tanggungjawab secara internal adalah sulit, oleh karena itu memerlukan dorongan luar atau motivasi tertentu dari pihak-pihak tertentu.

### BAB III

## PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

### A. Tinjauan terhadap Unang-undang No.9 Tahun 1990.

Setelah mengamati bahwa,keadaan alam,flora dan fauna,peninggalan sejarah,budaya tradisional bangsa telah banyak mengalami kepunahan sebagai kibat dari perilaku masyarakat yang belum mengerti makna penting terhadap kelestarian alam dan lingkungannya. Seluruh potensi alam sebagaimana tersebut diatas adalah potensi bangsa yang dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan bangsa,karena potensi itu bernilai sosial dan ekonomi bangsa yang sangat setrategis dan menguntungkan negara.

Dengan demikian bahwa Pariwisata memiliki peranan yang sangat besar untuk memperluas usaha dan kesempatan bersama sebagai lapangan kerja baru bagi tumbuhnya sentra ekonomi dan sosial masyarakat.Pemanfaatan peluang baru itu akan lebih mendorong percepatan pembagunan daerah di era otonomi,dapat memperbesar tingkat pendapatan masyarakat dalam kerangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran,memupuk rasa nasionalis dan kedaerahan,memperkaya hasanah kebudayaan daerah dan nasional.

Bahwa dalam rangka pengembangandan peningkatan kepariwisataan,diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduandalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

Untuk mewujudkan keinginan pengembangan dibidang kepariwisataan,dipandang perlu menetapkan program dan langkah nyata didalam melakukan penggalian dan pelestarian pariwisata.

Bila dikaji dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, maka dapat dirincikan sebagai berikut: Arah pengembangan, asas pengembangan, tujuan pengembangan, klasifikasi objek wisata, prinsip pengembangan, jenis usaha pariwisata dan peran masyarakat dalam mengembangkan pariwisata daerah.

1. Asas Pengembangan.

- a. Asas Manfaat, artinya setiap pengembangan kepariwisataan memiliki nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik manfaat dari dimensi ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Asas keadilan, artinya pengembangan pariwisata memiliki kesamaan hak oleh setiap warganegara untuk menikmatinya dengan tidak melakukan unsur diskriminasi rasial, budaya dan agama.
- c. Asas Usaha bersama, artinya semua masyarakat tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk melakukan usaha dan berserikat untuk memajukan dunia kepariwisataan daerah.
- d. Asas kekeluargaan, adalah sistem pengembangan dan pengelolaan untuk kelstarian pariwisata daerah, adalah dengan memprioritaskan rasa kekeluargaan sesama bangsa, berdasarkan pandangan bahwasaudara lebih berharga dari yang lainnya.
- e. Asas keseimbangan, yakni pengembangan kepariwisataan dengan melakukan keseimbangan untuk kepentingan pariwisata dan lingkungan, kepentingan dunia dan akhirat, antara budaya dan agama dan sosial ekonomi dan lain-lain.

2. Tujuan Pengembangan Pariwisata.

Dalam melakukan perencanaan pengembangan, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan daerah dengan segala potensinya.
- b. Menciptakan Grend image
- c. Membangun rasa cinta tanah air dan daerah.

- d. Memberikan peluang untuk menumbuhkan nilai ekonomi.
- e. Memotivasi masyarakat didalam meningkatkan kesejahteraan.

3. **Klasifikasi Obyek Wisata.**

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi wisata yang heterogenitas,dapat dikelompokan :

- a. Obyek yang alami : keadaan alam daatan dan lauta,flora dan fauna.
- b. Buatan :Agro,benda cagar budayapetualangan,hiburan dan pengkaian.
- c. Minat khusus:Mmemancing laut,danau,kunang-kunang.

4. **Perinsip pengembangan.**

Dalam melanjutkan pengembangan pariwisata,tetap berperinsip :

- a. Ekologi, artinya suatu upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan alam disekitar obyek wisata.
- b. Ekonomi,artinya pengembangan pariwisata memperhatikan kesejahteraan eonomi sebagaai basis kehidupan masyarakat.
- c. Hukum,artinya perinsip berpegang kepada aturan dan hukum yang berlaku.agar sistem kepariwisataan berjalan dengan baik.
- d. Budaya,artinya keberadaan budaya adalah utama utuk diperhatikan sebagai salah satu daya tarik para wisatawan.

5. **Usaha jasa wisata**

Untuk memperlancar arus wisatawan,maka diperlukan jasa wisata ntuk memberikan andil pelayanan wisata kepada wisatawan daerah dan mancanegara. Untiuk itu dapat dibagi dalam :Usaha Wisata,jasa wisata dan pengusaha obyek wisata.

**B. Pendekatan Konstitusional.**

Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya,telah menyebutkan didalam pembukaanya pada salah satu baris pada bait ke empat yang

menyatakan”untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan keidupan bangsa dan ikutserta melaksanakan ketetiban dunia.....”Dengan demikian kesejahteraan adalah penting didalam kehidupan bangsa yang penuh dengan persaingan. Sektor Pariwisata adalah sektor yang sangat elastis dengan kondisi zaman didalam memberikan harapan untuk rakyat menjadi sejahtera,karena nilai kepariwisataan akan semakin lebih menarik dikala masyarakat menjadi moderen. Dengan perkembangan teknologi terkini dapat memberikan andil kepariwisataan yang sangat tinggi ddalam mensejahterakan rakyat.

1. Pasal 33 undang-undang Dasar 1945,telah menyebutkan antara lain:
  - 1.1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
  - 1.2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara.
  - 1.3. Bummi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuaaai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - 1.4. Perekonpomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan perinsip kebersamaan ,efsiensi,berkeadilan,berkelanjutan ,berwawasan lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990.

Mengingat kondisi alam Indonesia yang kaya dengan flora dan fauna,peninggalan sejarah dan purbakala,potensi seni,budaya dan objek wisata yang beraneka ragam nilai dan karakteristiknya merupakan sumber kekayaan yang sangat besar untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu Undang-undang kepariwisataan mengatur potensi kekayaan bangsa dengan suatu ketentuan yang dikenal denhgan Undang-undang No.9 Tahun 190 tentang Pariwisata. Undang-undang ini pada perinsipnya sebagai implementasi dari

keinginan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 33 tentang Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Adalah suatu pendekatan yang konstitusional Undang-undang No.9 Tahun 1990 sebagai ujud dari ruhnya Undang-undang Dasar 1945 yang menyangkut dengan kesejahteraan rakyat. Bila dikaitkan dengan kepariwisataan, maka asas dan tujuan pengembangan kepariwisataan adalah asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil, merata dan perikehidupan berkeseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Suatu tuntutan yang rasional pada era reformasi bahwa setiap orang menghedaki kesejahteraan, karena dalam suasana kehidupan yang maju peranan ekonomilah yang sangat dominan disegala bidang kehidupan. Sayidiman Suryo Hadiprojo dalam bukunya "Rakyat sejahtera Negara kuat" Rakyat sejahtera harus menjadi semboyan yang dijadikan keadaany nyata. Hanaya rakyat yang sejahteralah yang dapat menjaddikan negara kuat. Pasalnya tanpa itu tak mungkin negara menghimpun kekuatan keuangan untuk membiyayai sedemikian banayak keperluan yang mustahil dibiayai dunia swasta" (Sayidman Suryohadiprojo:2007:101).

### **C. Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Tentang Keperawisataan**

#### **1. Peraturan Daerah Nomor 43 tahun 2002.**

Sesungguhnya usaha dibidang kepariwisataan memiliki arti yang sangat setrategis terutama didalam pengembangan ekonomi yang notabene kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya ebagai ujud kemaanun dari Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tentang Kewenangan pusat dan daerah propinsi dan Kabupaten kota. Perizinan usaha dibidang kepariwisataan adalah salah satu kewenangan kabupaten Kota. Oleh karena itu Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri hilir secara tegas mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 43 Tahun 2002. yang berisikan tentang Usaha Rekreasi dan hiburan Umum Dalam konsepnya adalah bahwa Usaha rekreasi adalah Hiburan Umum aalah setiap usaha komerssial yang rungan

lingkupnya kegiatan meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Termasuk didalam usaha rekreasi adalah :Taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam padang golf, kolam memancing, gelanggang ketangkasan, gelanggang: bowling, pertunjukan film, pasar seni, teater, balai pertemuan umum, fasilitas olah raga, pusat kesehatan dan kebugaran, balai kecantikan, pangkas rambut, cafe, persewaan video dan gedung serba guna. (Lembaran Daerah Kab. Inhil. No. 43 Tahun 2002).

## 2. Peraturan Daerah nomor 44 Tahun 2002.

Peraturan ini mengatur tentang Usaha Objek Wisata dapat berbentuk Badan Usaha ataupun Perseorangan, yang pada prinsipnya adalah untuk memaksimalkan fungsi potensi Objek wisata sebagai tempat yang memiliki nilai ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. (Lembaran Daerah Kab. Inhil No. 44 Th. 2002).

### **C. Gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir.**

Latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

#### **1. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia**

##### **a. Kerajaan Keritang**

Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing.

### ***b. Kerajaan Kemuning***

Kerajaan Kemuning didirikan oleh raja Singapura ke-V yang bergelar Raja Sempu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain yang lebih dikenal dengan nama Prameswara. Pada tahun 1231 telah diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti-bukti peninggalan kerajaan ini adalah ditemukannya selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

### ***c. Kerajaan Batin Enam Suku***

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Diantaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni :

1. Suku Raja Asal di daerah Gaung.
2. Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
3. Suku Nek Gwang di daerah Anak Serka.
4. Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
5. Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
6. Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.

### ***d. Kerajaan Indragiri***

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka. Sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. pada tahun 1473, waktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin

Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), beliau menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang-orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963.

#### **e. Masa Penjajahan Belanda**

Dengan adanya *tractaat Van Vrindchaap* (perjanjian perdamaian dan persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi *Zelfbestuur*. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang *Controlleur* yang membawahi 6 daerah keamiran :

1. Amir Tembilahan di Tembilahan.
2. Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.
3. Amir Tempuling di Sungai Salak.
4. Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.
5. Amir Enok di Enok.
6. Amir Reteh di Kotabaru

*Controlleur* memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga *Zelfbestuur* Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

#### **f. Masa Pendudukan Jepang**

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah *Controlleur* K. Ehling . Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang *Cun Cho* yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 *Ku Cho*, yaitu

1. *Ku Cho* Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.
2. *Ku Cho* Sungai Luar.
3. *Ku Cho* Enok.
4. *Ku Cho* Reteh.
5. *Ku Cho* Mandah.

Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.

## **2. Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pada awal Kemerdekaan RI, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu :

1. Wilayah Tempuling/Tembilahan.
2. Wilayah Enok.
3. Wilayah Gaung Anak Serka.

4. Wilayah Mandah/Kateman.
5. Wilayah Kuala Indragiri.
6. Wilayah Reteh

Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing :

- a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi kecamatan :
  - Kecamatan Tempuling.
  - Kecamatan Tembilahan.
  - Kecamatan Gaung Anak Serka.
  - Kecamatan Mandah.
  - Kecamatan Kateman.
  - Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukotanya Tembilahan.
- b. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan meliputi kecamatan :
  - Kecamatan Enok.
  - Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Enok.

### **3. Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir**

Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

## **a. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir**

### **1. Visi Pembangunan Daerah**

Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang berbasis pertanian dan sumber daya perairan, didukung oleh sumber daya manusia yang mandiri, agamis, sejahtera lahir dan batin pada tahun 2020.

### **2. Misi Pembangunan Daerah**

Mengembangkan agroindustri dan agribisnis dengan memanfaatkan lokasi yang strategis serta daerah perairan yang dimiliki.

1. Mengembangkan pembangunan daerah agar tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berbasiskan pertanian di wilayah bagian tengah dalam jangka pendek dan meluas mencakup Malaysia dan Singapura dalam jangka panjang.
2. Memanfaatkan kondisi perairan yang dimiliki sebagai jalur distribusi dan perdagangan serta pintu gerbang timur bagi daerah sekitarnya.
3. Mewujudkan dan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur fisik, ekonomi, sosial, budaya dan politik untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan perluasan pasar melalui kerjasama antar daerah.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing, menguasai IPTEK dan berbasiskan IMTAQ.
7. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis, adil, jujur dan transparan serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

### 3. Letak Geografi

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah daratan 11.605,97 km<sup>2</sup>, perairan laut 6.318 Km<sup>2</sup> dan perairan umum 888,97 Km<sup>2</sup> serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Batas-batas wilayah tersebut dapat dilihat pada peta Kabupaten Indragiri Hilir berikut ini :



**Sumber : Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir 2004**

**Gambar 3.1**  
**Peta Kabupaten Indragiri Hilir**

**Tabel 3.1**  
**Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir**

- Kecamatan Tembilahan
- Kecamatan Tembilahan Hulu
- Kecamatan Tempuling
- Kecamatan Kuala Indragiri
- Kecamatan Batang Tuaka
- Kecamatan Kateman
- Kecamatan Mandah
- Kecamatan Gaung Anak Serka
- Kecamatan Gaung
- Kecamatan Enok
- Kecamatan Tanah Merah
- Kecamatan Reteh
- Kecamatan Keritang
- Kecamatan Pelangiran
- Kecamatan Teluk Belengkong
- Kecamatan Pulau Burung
- Kecamatan Kemuning

**Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir 2004**

#### **4. Fisiografi**

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu : Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat / Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain. Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

## **5. Tanah**

Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di Wilayah Indragiri Hilir terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam *natural river levees* yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol) dan Gleihumus (Inceptisol).

Untuk daerah Indragiri Hilir bagian selatan disekitar daerah Keritang terdapat tanah podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Organosol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan lebih dari 1 (satu) meter umumnya dianggap tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai tanah pertanian. Secara umum, kondisi tanah dalam Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan tanah yang subur bagi bahan pertanian dalam arti luas, namun sangat terikat dengan sistem Trio Tata Air.

Tanah-tanah gambut yang tebal dan bahan organiknya lebih dari 200 cm, praktis belum diolah. Jika pun ada masih terbatas luasnya. Masalah yang dihadapi dalam usaha reklamasi tanah-tanah gambut dilakukan dengan mengadakan drainase, tetapi dapat berakibat akan terjadinya bahaya pengerutan atau penurunan tanah (*subodence*). Pengerutan ini terjadi karena berkurangnya kadar air tanah sehingga terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pengaturan kedalaman air tanah harus betul-betul diperhatikan.

## **6. Vegetasi**

Vegetasi alami dari daerah tanah-tanah organosol, alluvial dan gleihumus adalah hutan pematang, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan pasang surut, penggunaan lahan untuk hutan lebat, belukar dan sejenisnya pada tahun 1994 seluas 841.242 hektar.

Luas areal perkebunan meningkat dari 379.760 hektar menjadi 464.802 hektar atau meningkat 8,50% dibandingkan dengan periode sebelumnya sedangkan total produksi hasil perkebunan juga mengalami peningkatan dari 283.266 ton menjadi 416.690 ton naik sebesar 133.424 ton atau 13,34%.

## **7. Iklim**

Topografi daerah Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, curah hujan tertinggi 1300 mm, hujan turun antara bulan oktober sampai maret setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun selama 3 (tiga) bulan lamanya. Sehingga menimbulkan kesulitan air bersih, pengairan dan sebagainya.

Angin yang bertiup sepanjang tahun adalah angin utara dan angin selatan. Pada waktu musim angin utara terjadi musim gelombang, serta air pasang yang cukup tinggi, yang membawa air laut berkadar garam ke hulu sungai, sehingga membawa pengaruh terhadap tingkat kesuburan bagi tanam-tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kadar air dengan tingkat keasinan tinggi.

## **8. Pengairan**

Secara geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi Investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat. Sehingga kabupaten ini disamping dikenal dengan julukan Bumi Sri Gemilang, juga dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Parit.

### **b. Potensi Daerah**

#### **1. Pertanian**

Potensi sumber daya lahan sawah tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai luas 84.888 hektar. Kecamatan Keritang memiliki potensi lahan sawah terluas yaitu 17.583

hektar. Sedangkan potensi lahan sawah terkecil adalah kecamatan Mandah 300 hektar. Dari kecamatan-kecamatan tersebut 7 diantaranya merupakan daerah potensi lahan sawah yang dijadikan andalan dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan terutama komoditas padi.

Potensi lahan sawah yang telah dimanfaatkan seluas 33.465 hektar, sedangkan potensi lahan sawah yang belum dimanfaatkan mencapai luas 51.423 hektar. Potensi lahan kering untuk pertanian tanaman pangan mencapai luas 158.859 hektar, meliputi lahan pekarangan/kebun, ladang/huma dan lahan kering yang sementara tidak diusahakan. Lahan kering terluas terdapat di Kecamatan Keritang mencapai 19.615 hektar.

Dari luas potensi telah dimanfaatkan seluas 20.387,49 hektar yang dipergunakan untuk tanaman padi, palawija dan hortikultura. Luas potensi lahan yang tersedia telah ditanami padi seluas 34.887 hektar di lahan sawah dan 720 hektar pada lahan kering. Usaha diversifikasi pangan terus diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, salah satu upaya tersebut antara lain melalui pengembangan berbagai macam tanaman palawija, sayur sayuran dan buah-buahan.

Oleh karena luasnya tanah yang tersedia maka peluang untuk investasi di bidang pertanian tanaman pangan sangat besar antara lain :

- Padi dan Palawija
- Sagu
- Buah-buahan.

## **2. Perkebunan**

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Perkembangan kegiatan perkebunan di Indragiri Hilir menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan, meningkatnya produksi, dan semakin beragamnya jenis tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan

yang cukup potensial di daerah ini adalah kelapa, sawit, kopi, coklat, pinang dan sagu.

Sampai dengan tahun 2004 perkembangan luas areal tanaman perkebunan dan produksi mencapai 519.385,7 hektar dengan produksi 568.233,6 ton, adapun luas areal dan produksi perkebunan meliputi bermacam-macam komoditas diantaranya kelapa dalam, kelapa hybrida, karet dan kelapa sawit. Selain itu komoditas lain sebagai tanaman sela berupa tanaman pinang, kopi, coklat dan sagu.

Berdasarkan pola pengembangan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilaksanakan sampai saat ini adalah :

1. Pola UPP. Dilaksanakan langsung oleh masyarakat dari proyek P2RT, TCSDP, ISDP, sedangkan komoditas yang dikembangkan adalah kelapa hybrida serta kelapa dalam.
2. Pola Swadaya. Pada pola ini kegiatannya langsung dilaksanakan oleh para petani itu sendiri hanya sebagian saja yang dibantu oleh dana APBD I maupun dana APBD II. Bantuan pemerintah hanya berupa bibit tanaman, sarana produksi, bantuan pengendalian hama dan penyakit dan pelatihan petani berupa penyuluhan. Luas tanam untuk pola swadaya kelapa sawit mencapai 2.193 hektar dengan produksi 1.769,9 ton.
3. Pola PIR. Pada pola PIR ini dimana pada awalnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PTP/PBS dengan komoditas yang dikembangkan adalah kelapa hybrida. Pesertanya terdiri dari petani transmigran dan lokal.
4. Perkebunan Besar. Di Kabupaten Indragiri Hilir beroperasi perusahaan besar swasta, yang berorientasi pada pengembangan kegiatan usaha komoditas kelapa hybrida dan kelapa sawit.

Peluang investasi di bidang perkebunan cukup potensial, disamping lahan yang tersedia cukup luas, tanahnya cukup subur. Tanaman yang potensial di lahan perkebunan ini antara lain :

- Kelapa Unggul

- Kelapa Hybrida
- Kelapa Sawit
- Kopi dan Coklat.

### **3. Peternakan**

Pembangunan peternakan adalah upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat disamping meningkatkan pendapatan. Pembangunan peternakan diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat yang dilakukan melalui kegiatan peternakan yang berskala ekonomi, menggunakan teknologi tepat guna sehingga didapat nilai tambah yang meningkat serta mendorong peranan masyarakat yang lebih besar.

Dalam pelaksanaan program peternakan sasaran yang dicapai tahun 1999/2000 yaitu :

- Sasaran populasi ternak yakni ternak besar sejumlah 10.430 ekor, ternak kecil sejumlah 30.584 ekor, dan ternak unggas 741.523 ekor.
- Sasaran produksi daging 2.114,770 kg dan telur sebesar 612.120 kg
- Sasaran konsumsi daging 4,40 dan telur 2,84 kg/kapita/tahun.

#### **a. Perkembangan Produksi Hasil Ternak**

Perkembangan produksi ternak sampai akhir tahun 1999/2000 mencapai 2.101.869 kg untuk daging dan 556.574 kg untuk telur. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, produksi daging meningkat sebesar 6,35% atau mencapai 99,39% dari target. Sedangkan untuk produksi telur meningkat 0,02% atau 90,93 dari target.

#### **b. Perkembangan Konsumsi Hasil Ternak**

Perkembangan konsumsi hasil ternak menunjukkan peningkatan dimana daging mencapai 4,23 kg/kapita/tahun dan telur mencapai 2,63 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu konsumsi daging meningkat sebesar 4,17 % atau mencapai 96,14 % dari

target. Sedangkan untuk telur meningkat 0,34 % atau mencapai 92,61 % dari target.

### c. Peluang Investasi

#### 1. Lahan

Penyediaan lahan untuk usaha peternakan semakin besar dengan dibukanya lahan-lahan perkebunan yang baru dan penyediaan lahan ternak (HMT) semakin banyak dengan semakin berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri.

#### 2. Ternak

Populasi ternak masih kecil dan mempunyai peluang untuk dikembangkan karena memiliki lahan luas yang belum banyak dimanfaatkan.

#### 3. Pemasaran

Pemasaran produksi hasil peternakan di daerah ini sangat besar baik berupa daging maupun telur, karena keterbatasan produk peternakan yang dihasilkan tidak seimbang dengan permintaan pasar, maka untuk memenuhi kebutuhan lokal saja harus didatangkan dari luar daerah, seperti berupa pasokan daging sapi setiap tahunnya didatangkan 500-700 ekor. Unggas mencapai 250.000-350.000 ekor dan telur mencapai 900-1.000 ton.

Peluang ini semakin besar apabila dikaitkan dengan antisipasi terhadap pemasaran di wilayah SIJORI.

#### 4. Perikanan

Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir cukup besar, meliputi penangkapan di perairan umum, budidaya air payau (tambak), budidaya air tawar (kolam), budidaya laut (keramba dan jaring apung) dan budidaya pantai (pemeliharaan kerang anadara dan udang kipas).

Tabel 3.2

**Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004**

No.	Jenis Usaha	Sumber	Potensi	Pemanfaatan	%
1	Penangkapan Perairan Laut	360.674	36.404 ton	34.836,30 ton	95,69
2	Penangkapan Perairan Umum	4.334	2.600 ton	2.525,30 ton	97,69
3	Budidaya Tambak		31.600 ton	1.388,50 Ha	4,39
4	Budidaya Kolam		1.657 Ha	76,55 Ha	4,62
5	Budidaya Kejapung		20.000 Ktg	120 Ktg	0,60
6	Budidaya Kerang Darah		2.500 Ha	20 Ha	0,80
7	Budidaya Udang Kipas		2.500 Ha	-	0,00

**Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir 2004**

Bertitik tolak dari potensi dan tingkat pemanfaatan, Kabupaten Indragiri Hilir masih memiliki sumber daya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar untuk peluang investasi dan bisnis, meliputi :

1. Pengembangan budidaya tambak pada lahan kritis bekas kebun kelapa rakyat dengan potensi areal 18.600 Ha.
2. Pengembangan budidaya tambak pada lahan hutan mangrove dengan potensi areal seluas 13.000 Ha.
3. Pengembangan budidaya keramba jaring apung dengan potensi perairan dapat menampung sebanyak 20.000 kantong.
4. Pengembangan budidaya kerang darah (*Anadara Granosa*. L) dengan potensi areal seluas 2.500 Ha dan benih/spat melimpah secara alami. Produksi hasil tangkapan nelayan 4.000 ton pertahun.
5. Pengembangan budidaya kepiting (*Scylla Serrata*) dengan potensi areal cukup luas dan benih alam melimpah.
6. Pengembangan budidaya udang kipas (*Uratos Quilla Nepa*. Sp) dengan potensi areal cukup luas dan benih alam melimpah.
7. Potensi abuk udang untuk bahan baku industri pakan ternak sekitar lebih dari 120 ton pertahun.

8. Potensi ikan rucah untuk bahan baku industri pakan ternak sebesar 4.180 ton pertahun.

### 5. Kehutanan

Wilayah hutan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 1.184.513 Ha, terdiri dari BKPH Tembilahan mencapai 322.080 Ha, BKPH Enok 517.051 Ha, dan BKPH Guntung 345.382 Ha.

Produk hasil-hasil kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan. Produksi realisasi produksi kayu bulat tahun 1999/2000 telah mencapai 167.922,97 m<sup>3</sup> yang meliputi produksi dari HPH 142.014,99 m<sup>3</sup> dan produksi non HPH 25.907,98 m<sup>3</sup>. Sedangkan realisasi produksi kayu bakau mencapai 88.574.164 Ha yang terdiri dari produksi dari HPH 88.057,114 Ha m<sup>3</sup>, produksi dari non HPH 517.050 m<sup>3</sup> dan KBK/BBS 3.312,54 m<sup>3</sup>. Produksi kayu olahan meliputi kayu gergajian, moulding/dowels, chip bakau dan chip campuran.

**Tabel 3.9**

**Produksi Hasil Hutan Kayu Bulat dan Kayu Olahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1999/2004**

No.	Keterangan	Produksi (m <sup>3</sup> )
1	Kayu bulat (HPH)	142.014,990
2	Kayu bulat (Non HPH/BBS/KB)	25.907,980
3	Kayu bakau (HPH)	88.057,114
4	Kayu bakau (Non HPH)	517.050,000
5	Kayu bakau (KBK/BBS)	3.312,540
6	Kayu Olahan (Gergajian)	14.957,229
7	Kayu Olahan ( Moulding/Dowel)	11.299.032
8	Kayu Olahan ( Chip Bakau)	99.582,317
9	Kayu Olahan ( Chip Bakau)	2.200,701

**Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir 2004**

Jumlah industri pengolahan kayu yang berada di Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangkuan Hutan Tembilahan tahun 1999/2000 cukup banyak terdiri dari industri kayu gergajian jumlah usaha adalah 25 buah, industri chip bakau 2 buah, dan industri chip campuran 1 buah. Dengan demikian maka volume ekspor kayu keluar negeri cukup besar. Negara tujuan komoditi ekspor kayu meliputi Singapura, Jepang dan Taiwan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir Terdapat beberapa jenis kayu yang memiliki nilai potensi bisnis yang tinggi, antara lain:

1. Ramin (*genysitus boncanus*).
2. Bakau (*mangroves*).
3. Meranti (*shorea*).
4. Kempas (*kompassia malaccesia*).
5. Jelutung (*dyena contaluca*).
6. Pulai (*rouwolfia serpina*).

Pembangunan dibidang industri kehutanan dan perKayuan seperti Sengon (*Albizza Chinensis*), Akasia Maggium, dan Sungkai.

## 6. Pertambangan

**Tabel 3.10**  
**Cadangan Bahan Galian di Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan	Kegunaan	Keterangan
1.	Bentonit	Batu Ampar, Kec. Kemuning	122.000 * ton	Penjernih Minyak Sawit	Mutu Baik
2.	Kaolin	Batu Ampar Sencalang, Kec. Keritang	9.690 * ton 3.727.350 * ton	Bata Tahan Api	---
3.	Granit	Peg. Endalang, Kec.			---

		Reteh			
4.	Pasir Kuarsa	Sencalang Kota Baru, Kec. Keritang	4,6 juta * ton SiO <sub>2</sub> >80%, luas 200 Ha 80,5 juta * ton	Industri Kaca	Mutu Baik
5.	Titan	Pulau Kijang, Kec. Reteh	5,7 juta * ton TiO <sub>2</sub> > 0,96 %	Logam Ringan	---
6.	Batubara	Bukit Tigapuluh Utara, Kec. Kemuning	79 juta * ton Cal = 5500	Bahan Energi	---
7.	Timah	Selensen, Kec. Kemuning	4,42 - 21,94 gr/cm <sup>3</sup>	Peralatan Rumah Tangga	---

**Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir 2004**

Keterangan : \* Hipotetik/Spekulatif

## 7. Industri

Kondisi sektor industri di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004 menunjukkan jumlah industri sebanyak 485 unit, meliputi industri logam, mesin dan elektronika , 198 unit industri aneka dan industri kimia, 287 unit industri agro dan hasil hutan. Adapun investasi sektor industri mencapai Rp. 3.037.698.946,6 dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 12.524 orang. Sedangkan nilai produksi mencapai Rp. 39.118.485.

Perkembangan jumlah perusahaan atas penerbitan SIUP secara keseluruhan tahun 2004 mencapai 3.370 buah jika dibandingkan dengan tahun 1999 berjumlah 3.243 buah, mengalami peningkatan sebanyak 227 buah atau 7,22 persen. Berikut ini ulasan beberapa industri aneka dan kerajinan :

### a) Industri Pengolahan Kelapa Terpadu

Potensi areal tanaman kelapa 442.201 Ha, produksi 119.399.000 butir/bulan, status tanaman kelapa merupakan milik masyarakat, jenis industri yang dikembangkan adalah tepung kelapa, minyak kelapa, sabut kelapa, arang tempurung, nata de coco, perabot batang kelapa dan lain-

lain. Industri ini berlokasi di Kecamatan Tempuling, Batang Tuaka, Enok, Tanah Merah, Kateman, Reteh dan Mandah.

*b) Arang Tempurung*

Potensi bahan baku sebanyak 384.090 ton dengan kapasitas produksi sebanyak 79.420 ton/tahun ini akan terus mengalami peningkatan karena banyaknya permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, serta industri menyebar di hampir seluruh kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

*c) Sabut Kelapa*

Potensi bahan sebanyak 67.892 ton dengan kapasitas produksi sebanyak 2.760 ton/tahun. Industri ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan produksi sejalan dengan banyaknya permintaan dari luar negeri terutama Negara Malaysia untuk lebih dikembangkan menjadi bahan pembuat jok mobil dan matros. Industri ini berlokasi di Kecamatan Tempuling, Gaung dan Mandah.

*d) Gula Kelapa*

Potensi bahan sebanyak 5.529 ton dan kapasitas produksi sebanyak 3.427 ton/tahun. Industri ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan banyaknya permintaan dalam dan luar negeri. Industri ini berada hampir di seluruh kecamatan dalam kabupaten Indragiri Hilir.

*e) Pengolahan Batang Kelapa*

Potensi bahan sebanyak 724.520 m<sup>3</sup> dengan kapasitas produksi sebanyak 2.453 m<sup>3</sup>/tahun dalam bentuk kayu balokan. Industri ini akan terus mengalami peningkatan dan berorientasi ekspor dengan negara tujuan Malaysia untuk dikembangkan menjadi kosen dan perabot rumah tangga.

*f) Sagu*

Potensi sebanyak 2.462 ton dan kapasitas produksi sebanyak 1.068 ton/tahun, dan diperkirakan akan mengalami peningkatan dan pengembangan berupa produksi sagu basah dan sagu lemak. Industri ini memiliki peluang ekspor dengan negara tujuan Singapura dan Malaysia. Industri ini tersebar di kecamatan Kateman, Mandah, Gaung dan Gaung Anak Serka.

*g) Kue Bangkit dari Bahan Sagu*

Industri ini merupakan pengembangan dari produk sagu basah, memiliki potensi bahan sebanyak 2.450 kg dengan kapasitas produksi sebanyak 3.205 kotak/tahun dan berpotensi ekspor. Sentra industri ini berada di dalam Kecamatan Gaung dan Kecamatan Mandah.

*h) Industri Andalan Kapal Kayu*

Kabupaten Indragiri Hilir adalah daerah perairan dimana alat transportasi dominan yang digunakan oleh masyarakat menggunakan sungai dan laut. Sehubungan hal tersebut, salah satu hasil yang potensial adalah industri pembuatan kapal kayu dan boat. Industri ini terus meningkat dengan kapasitas produksi kapal kayu dari 5 s/d 350 ton yang sudah dapat dibuat oleh pengrajin. Industri ini, berada di Kecamatan Tembilahan, Tempuling, Gaung, Gaung Anak Serka, Keritang dan Kateman.

*i) Kerajinan Tenun dan Border*

Potensi bahan sebanyak 5.951 lembar dengan kapasitas produksi sebanyak 1.826 lembar / tahun. Sentra industri ini menyebar di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir seperti Reteh, Tanah Merah, Kuindra, Tembilahan dan Enok.

*j) Kerajinan Anyaman Pandan*

Potensi bahan sebanyak 8.508 set dengan kapasitas produksi sebanyak 2.320 set yang merupakan primadona industri kecil / kerajinan dan rumah tangga daerah Kabupaten Indragiri Hilir, berorientasi ekspor dengan negara tujuan Singapura dan Malaysia. Sentra industri ini menyebar hampir di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Peluang industri cukup besar karena tersedia bahan-bahan yang banyak dan tenaga kerja. Adapun yang berpeluang adalah :

- Industri pengolahan produk kelapa.
- Industri pengolahan gula kelapa.
- Industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.
- Industri pengolahan sagu.
- Industri pengolahan jagung.
- Industri pengolahan kayu lapis.
- Industri pengolahan untuk bahan bangunan.
- Industri pengolahan buah-buahan.
- Industri pengolahan pakan ternak dan ikan.
- Industri pengolahan ubi kayu

**5. Infrastruktur**

**1. Jalan**

Peranan prasarana jalan darat di Kabupaten Indragiri Hilir sangat penting untuk menghilangkan ketergantungan dengan transportasi sungai/laut dengan pasang surutnya, serta keterisoliran daerah-daerah terpencil.

Pembangunan jalan darat yang telah dilaksanakan tersebut telah dapat menghubungkan Ibu kota Kabupaten dengan beberapa ibu kota kecamatan. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir 8 kecamatan diantaranya telah dapat menggunakan sarana angkutan transportasi darat.

Jalan darat yang telah dilaksanakan antara lain :

- Rehabilitasi jalan Tempuling -Tembilahan 9 Km.
- Rehabilitasi jalan Tembilahan - Enok 23 Km.
- Pembuatan Box Culvert Ruas Jalan Tembilahan - Enok 4 buah.
- Rehabilitasi jalan Pulau Palas - Tembilahan 6,5 Km.
- Rehabilitasi jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya 37 Km.
- Pemeliharaan jalan kota Tembilahan 6,7 Km.
- Peningkatan jalan Tembilahan Kuala Getel/Sungai Luar-Sungai Dusun
- Sungai Piring 18,4 Km.
- Peningkatan jalan Sungai Piring - Teluk Pinang 15 Km.
- Peningkatan jalan Teluk Pinang - Lahang Baru 9 Km.

Berdasarkan data tahun 1997/1998 panjang jalan di Kabupaten Indragiri Hilir 1.024,48 Km yang terdiri dari kondisi baik 175.00 Km, dilihat dari jenis permukaan panjang jalan 1.024,48 Km. Jalan yang telah diaspal sepanjang 247,97 Km, jalan kerikil 30,00 Km, jalan kelas III C 284.62 KM.

## **2. Pelabuhan**

Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa pelabuhan dan dermaga, karena daerah ini sebagian besar desa/kecamatan berada dipesisir pantai/sungai dan sarana transportasi yang paling dominan digunakan masyarakat daerah ini adalah transportasi sungai/laut.

Pelabuhan utamanya adalah Tembilahan yang digunakan untuk bongkar muat barang, orang dan jasa baik antar pulau maupun ekspor. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan lainnya yang dikembangkan adalah pelabuhan Samudra Kuala Enok dan Sungai Guntung. Sebagai pendukung lalu lintas penumpang, barang dan hewan.

Untuk menjangkau antara satu daerah/kelompok masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas motor fery, speed boat, sampan bermotor (pompong) dan perahu, lalu lintas penumpang kapal yang menghubungkan antar pulau

diluar Indragiri Hilir melalui pelabuhan Kuala Enok, disamping itu juga dapat dimanfaatkan pelabuhan Tembilahan, Sungai Guntung, Pulau Kijang, Teluk Pinang dan pelabuhan Concong Luar.

### **3. Air Minum**

Masalah air minum adalah merupakan masalah sepanjang tahun yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya, terutama pada musim kemarau dimana sumber air bersih sulit di dapat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir seperti kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan industri, perhotelan dan lain-lain, telah dibangun beberapa instalasi distribusi air bersih. Namun karena perkembangan penduduk yang sangat cepat serta perkembangan perekonomian yang cukup pesat, penyediaan air bersih yang ada semakin tidak memadai.

Oleh karena itu pembangunan sarana air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan dan industri tidak saja pembangunannya di Tembilahan sebagai pusat ibukota melainkan telah dibangun pada beberapa kecamatan yang ada. Mengingat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi maka kebutuhan air bersih semakin meningkat setiap tahun, sebaliknya kemampuan untuk menyediakan air bersih semakin terbatas. Oleh karena itu harus ada kebijaksanaan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan penyediaan air bersih. Dilain pihak dengan semakin terbatasnya dana pembangunan dari pemerintah, maka peranan swasta sudah harus ditingkatkan terutama dalam membangun jaringan pengadaan sarana air bersih dan bekerjasama dengan pemerintah dalam pengaturan pendistribusian kepada masyarakat.

Adapun pengelolaan sumber air bersih khusus untuk kota Tembilahan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Tembilahan yang airnya berasal dari Sungai Indragiri, Kuala Enok, Pulau Kijang, Sapat, Sungai Guntung dan Enok Dalam, dimana prosesnya melalui teknik penyulingan yang memerlukan dana cukup besar. Pelayanan

sebagai publik service PAM bukan semata-mata bersifat ekonomis, melainkan juga bersifat sosial. Untuk keperluan tersebut melalui bantuan subsidi, telah tersedia Fasilitas Hydran Umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis.

#### **4. Listrik**

Beberapa pembangunan kelistrikan di Kabupaten Indragiri Hilir belumlah seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya berbagai kegiatan seperti hotel, restoran, perkantoran, perumahan, pertokoan dan industri-industri yang pada umumnya memanfaatkan tenaga listrik, jelas tidak dapat diimbangi dengan perkembangan pengadaan listrik.

Disamping itu mutu kelistrikan masih belum memadai antara lain voltase yang naik turun.

#### **5. Telepon**

Telepon merupakan alat yang sangat penting untuk kebutuhan komunikasi baik komunikasi lokal, interlokal (SLJJ) maupun komunikasi internasional (SLI). Untuk hal itu, Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki dan menggunakan sistem telepon digital antara lain di:

- Tembilahan
- Sungai Guntung
- Khairiah
- Mandah
- Teluk Pinang
- Sungai Piring
- Sapat
- Kuala Enok
- Pulau Kijang
- Sungai Salak
- Kota Baru

Demikian juga untuk pemakaian hand phone/mobile phone telah bisa digunakan sejak tahun 1999.

## **6. Pos dan Giro**

Kantor Pos dan Giro Tembilahan adalah Kantor Pos dan Giro yang terletak di ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki fungsi ganda. Yaitu sebagai Kantor Pos dan Giro induk dari Kantor Pos dan Giro Pembantu yang ada di setiap kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir dan menjadi penghubung dari 9 buah rumah pos.

Sebagai konsekuensi logis dari suatu kantor yang terletak di kabupaten yang sedang berkembang, maka Kantor Pos dan Giro Tembilahan terus mengikuti perkembangan itu pula. Untuk meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro yang bertumpu pada pengembangan dengan meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- Peningkatan mutu pelayanan dengan cara mengembangkan alat produksi, penambahan sarana pengumpulan dan penyampaian kiriman pos dan giro, penyuluhan dan promosi serta pembinaan personalia.
- Peningkatan jangkauan pelayanan dengan pengembangan jangkauan pelayanan perkotaan, pengembangan jangkauan pelayanan pedesaan, serta pengembangan jangkauan pelayanan daerah terpencil dan lokasi transmigrasi.

## **6 Pariwisata**

### **1. Obyek Wisata**

Indragiri Hilir selain letaknya yang strategis dan berhadapan langsung dengan Pusat Pengembangan Pariwisata Internasional, seperti Singapore dan Malaysia juga berdekatan dengan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional seperti : Pulau Batam, Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun serta Tanjung Batu Kundur, selain itu Indragiri Hilir juga mempunyai

potensi obyek wisata dan daya tarik wisata yang tak kalah menariknya. Potensi dan daya tarik wisata itu antara lain :

a. Bukit Berbunga

Bukit berbunga terletak disebelah selatan Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, dengan jarak lebih kurang 4 km dari Desa Selensen (ibukota Kecamatan Kemuning) dan dapat ditempuh melalui jalan setapak yang berbukit-bukit dan melintasi dua buah sungai kecil. Disepanjang tebing Bukit Berbunga tumbuh berbagai jenis macam bunga yang menyelimuti bukit dengan aneka warna-warni menaburkan aroma sepanjang tahun.

b. Air Terjun

Air terjun Tembulun Rusa terdapat disebelah utara Desa Batu Ampar. Untuk menuju ke lokasi air terjun yakni dari Desa Batu Ampar menyusuri jalan Lintas Timur menggunakan kendaraan roda empat dan dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak menempuh hutan berbukit-bukit sejauh lebih kurang 2 km. Ketinggian air terjun lebih kurang 15 meter dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Disisi alur air terjun terdapat bebatuan yang menyerupai tangga untuk naik keatas, sedangkan dalam air sungai paling dalam 1,5 meter.

Selain Air Terjun Tembulun Rusa di kawasan ini juga terdapat obyek wisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi yaitu Air Terjun 86 dan Goa Leman serta obyek wisata menyusuri Sungai Ngibul yang bersumber dari Air Terjun Tembulun Rusa, sejauh lebih kurang 2,5 Km ke arah hilir aliran sungai tersebut menghilang dan masuk kedalam tanah/hutan sejauh lebih kurang 500 m kemudian baru muncul kembali. Aliran air sungai ini cukup deras dan sangat memungkinkan untuk dilakukan kegiatan Arung Jeram bagi pencinta alam.

c. Pantai Solop Pulau Cawan

Pantai Solop merupakan salah satu obyek wisata pantai/bahari yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Suatu pantai yang unik untuk dikunjungi, yaitu mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pantai-pantai yang ada di dunia, keunikannya adalah terdapat kawasan rawa/lumpur berpasir putih dari kulit kerang-kerangan yang dibawa ombak ke daratan pantai.

Pantai Solop cukup menarik untuk dikunjungi apalagi letaknya yang strategis yakni di jalur pelayaran Tembilahan - Pulau Batam. Keindahan Pantai Solop adalah terdapatnya pulau-pulau kecil di depan pantai dan disini juga juga dapat dinikmati pemandangan matahari terbenam di waktu sore, menambah keindahan dan daya tarik tersendiri dengan keasrian alamnya.

d. Pulau Burung (Agro Wisata)

Pulau Burung juga dikenal dengan sebutan pulau berkanal, dimana pada kawasan pulau ini terdapat beberapa kanal yang cukup menantang bagi pengunjung untuk menyelusuri kanal-kanal yang lebarnya 3 meter. Kanal-kanal tersebut membuat petakan-petakan perkebunan kelapa hybrida, kelapa lokal, kelapa sawit, perkebunan nenas dan kebun bunga serta kawasan tambak udang dan ikan.

Didalam kanal ini wisatawan juga dapat menikmati makanan/minuman air buah kelapa muda, buah nenas dan makanan ikan/udang segar bakar dari hasil tangkapan/memancing ditambak ikan/udang yang tersedia. Selain daya tarik wisata agro di kawasan ini juga terdapat obyek wisata alam yang cukup bagus dikunjungi yaitu Bukit Sari Intan, Bukit Sungai Segunung dan juga terdapat Goa Api Panjang serta kawasan pantai/bahari yaitu Pantai Sungai Danai.

Di kawasan ini wisatawan/pengunjung dapat menggunakan transportasi yang tersedia di dalam kawasan kanal seperti : Speed Boat, Sky Boat, Long Boat dan Motor Boat. Ini semua menjanjikan keindahan,

kenikmatan, kepuasan serta menjadi kenangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Burung.

e. Danau Taga Raja Guntung

Danau Taga Raja luasnya sekitar 100 Ha, menurut cerita dulunya dikenal dengan sebutan Kolam Raja, dimana kolam ini merupakan tempat pemandian dan sumber air bersih bagi Kerajaan Kateman. Kawasan Danau Taga Raja akan dikembangkan sebagai kawasan penyediaan air bersih dan kawasan pariwisata terpadu dengan luas kawasan sekitar 20 Ha. Akan dikembangkan Taman Rekreasi, Taman Pancing, Wisata Tirta dan Resort Pariwisata.

f. Danau Tanjung Condong

g. Danau Sungai Perigi

h. Benda Peninggalan Sejarah Budaya

j. Objek jiarah

Jarak danau cukup dekat dari kota Guntung yaitu sekitar 4 Km dan telah banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya sebagai tempat rekreasi dan wisata alam.

## **2. Akomodasi Konsumsi**

Akomodasi anda untuk menginap di Indragiri Hilir seperti hotel berbintang dan losmen/wisma cukup banyak tersedia di seluruh daerah terutama di Kota Tembilahan, Guntung, Kuala Enok, Pulau Kijang dan daerah lainnya. (Dapat dilihat pada tabel dibawah ini)

Restoran dan Rumah Makan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kota Tembilahan akan menyediakan makanan dan minuman yang bermacam-macam, seperti masakan ala Eropa, Chinese serta Sea Food yang terdiri dari kepiting, Udang, Kerang-kerangan (Kerang, Lokan,

Senteng, Kupang, Siput) dan Ikan Laut yang masih segar. Untuk jelasnya dapat dilihat daftar dibawah ini :

### **3. Transportasi**

Kabupaten Indragiri Hilir terutama Tembilahan dapat dicapai melalui jalan darat seperti dari dan ke Pekanbaru, Padang, Jambi dan seterusnya. Sedangkan transportasi laut ada pelayaran dari Kota Tembilahan ke daerah kepulauan seperti Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu Kundur, Kuala Tungkal/Jambi dan sebagainya. Pelayaran tersedia setiap dua kali sehari dengan menggunakan Ferry Jet Oil dan Speed Boat.

Ada beberapa jenis transportasi wisata di Indragiri Hilir antara lain :

a. **Becak**

Alat transportasi yang paling banyak tersebar diseluruh kota Tembilahan. Bentuk becak disini berbeda dengan becak umumnya, secara fisik bentuk becak ini mirip dengan becak yang terdapat di Malaysia.

b. **Ojek**

Angkutan kendaraan bermotor roda dua yang siap mengantar pengunjung ke pelosok manapun didalam kota. Kita tinggal menyebutkan kemana arah atau lokasi yang dituju.

c. **Mobil Rental**

Mobil rental atau mobil yang bisa disewa banyak tersedia, dengan bantuan petugas *front office* tempat menginap kita bisa menghubungi pemilik atau perusahaan mobil sewaan dan memesan mobil yang tersedia.

d. **Sampan dan Kapal Pompong**

Sampan dan kapal pompong adalah alat transportasi yang paling cocok untuk berkeliling bagi pengunjung/wisatawan untuk menyusuri dan menikmati pemandangan sungai dan melihat dari dekat kegiatan masyarakat di pinggiran sungai.

e. **Speed Boat**

Dengan kecepatan, kapasitas seat serta ukuran yang bervariasi, alat transportasi ini dapat mengantar pengunjung/wisatawan ke berbagai pelosok di kawasan Indragiri Hilir. Jika diperlukan speed boat ini bisa di *charter* sekaligus dengan pengemudinya.

#### 4. Cinderamata

Kerajinan Rumah Tangga masyarakat daerah ini juga dapat dijadikan sebagai cinderamata bagi pengunjung/wisatawan yang datang, kerajinan rumah tangga ini antara lain :

1. Tenun ikat, anyaman pandan seperti tikar, tudung saji, bakul, vas bunga, topi, dompet dsb.
2. Perabotan dari kayu, batang kelapa, nibung, bambu untuk pembuatan perabotan rumah tangga.
3. Makanan dan minuman khas daerah Indragiri Hilir dapat dibawa sebagai oleh-oleh seperti keripik pisang, sagu lemak, sagun sagu, kue bangkit dan makanan tradisioanl lainnya yang banyak terdapat di pasaran.

#### 7. Sosial Budaya

##### 1. Agama

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka agama yang dianut oleh warga Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ketahun turut mengalami perubahan juga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**

**Banyaknya Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Agama yang Dianut Berdasarkan Data Tahun 2000/2004**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha
1	Tembilahan	75.361	74.502	300	69	185	245
2	Tembilahan Hulu						
3	Tempuling	45.557	45.557	-	-	-	-

4	Kuala Indragiri	33.202	32.088	11	2	-	1.301
5	Batang Tuaka	22.226	22.095	7	-	-	123
6	Kateman	124.793	123.234	297	638	139	458
7	Mandah	39.090	38.540	4	-	-	538
8	Gaung Anak Serka	22.808	21.977	90	-	-	832
9	Gaung	37.273	37.185	5	4	-	108
10	Enok	34.336	34.281	5	5	23	22
11	Tanah Merah	32.318	31.061	73	32	-	1.152
12	Reteh	58.048	37.702	42	19	30	205
13	Keritang	58.376	38.239	64	-	-	73
14	Pelangiran						
15	Teluk Belengkong						
16	Pulau Burung						
17	Kemuning						

Sumber : Kantor Departemen Agama Indragiri Hilir 2004

Berdasarkan data pada tabel tersebut mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir adalah penganut Islam, keadaan tersebut sejalan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun perlu diakui bahwa kerukunan hidup beragama antara pemeluk agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha sangat harmonis dan penuh toleransi serta tidak terpengaruh modernisasi jaman yang cenderung meremehkan arti agama.

## **2. Pendidikan**

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari komposisi tingkat pendidikan masyarakat sekitar 85% berpendidikan tingkat SD ke bawah, sedangkan yang memiliki pendidikan tingkat SLTA, SMU/SMK dan Perguruan Tinggi belum memadai bila dilihat dari kebutuhan pembangunan dan peluang

kerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, keadaan kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir bisa disimak pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Keadaan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Data**  
**Tahun 2004**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Ruang Belajar	Rombongan Belajar
1	STK	28	76	1.549	59	59
2	SD	472	3.240	75.861	2.873	2.978
3	SLTP	53	712	13.144	344	325
4	SMU	16	239	1.573	107	117
5	SMK	2	56	1.064	22	25
<b>JUMLAH</b>		<b>562</b>	<b>4.323</b>	<b>93.191</b>	<b>3.405</b>	<b>3.513</b>

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hilir

**a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sri Gemilang**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sri Gemilang didirikan berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 117/D/O/1999 tanggal 13 Juli 1999 dan diresmikan Bupati Indragiri Hilir H.M. Rusli Zainal, SE. Acara peresmian dihadiri oleh Kopertis Wilayah X DR. H. Yunazar Manjang, Rektor Universitas Riau (UNRI) Prof. DR. H. Muchtar Achmad dan Dekan Fakultas Ekonomi UNRI Drs. H. Amir Hasan, Ak yang disertai penandatanganan naskah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNRI.

Peresmian juga ditandai dengan penerimaan mahasiswa TA. 1999/2000 untuk program studi Manajemen (S1) dan Akuntansi (D3). Sampai TA. 2000/2003 total jumlah mahasiswa STIE Sri Gemilang berjumlah 616 orang. Sejak TA.1999/2000, mahasiswa STIE Sri Gemilang senantiasa memperoleh beasiswa dari Kopertis Wilayah X dan Pemerintah Propinsi Riau, baik dalam bentuk Beasiswa Bantuan Mahasiswa (BBM) bagi mahasiswa kurang mampu maupun Tunjangan

Potensi Akademik (TPA) bagi yang berprestasi. Hingga TA. 2002/2003 terdapat 81 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa.

**b. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan**

STAI Auliaurrasyidin Tembilahan didirikan di Tembilahan pada tanggal 16 September 2000 di bawah naungan Yayasan Auliaurrasyidin Tembilahan. Saat ini telah mendapatkan Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 02/XII/K/2002. Keberadaan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan diharapkan dapat melahirkan sarjana dan cendekiawan muslim yang mampu mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun keilmuan lainnya guna disumbangkan pada agama, bangsa dan negara melalui peran sertanya dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Sampai saat ini STAI Auliaurrasyidin Tembilahan telah menghasilkan 39 orang alumni Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), 76 orang Ahli Muda (A.Ma.) Program Studi Pendidikan Guru Kelas SD/MI (PGK SD/MI), 29 orang Ahli Muda (A.Ma.) Program Studi Pendidikan Guru Agama Islam SD/MI (PGAI SD/MI) dan 53 orang Program Akta IV.

**c. Politeknik Pertanian Tembilahan**

Politeknik Pertanian Tembilahan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas dukungan pemerintah Propinsi Riau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Politeknik Pertanian Tembilahan bernaung dibawah Yayasan Gambut Indragiri yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Isra Samianty, SH Nomor 10 tanggal 13 Februari 2002.

Politeknik Pertanian Tembilahan membuka tiga jurusan yaitu : Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Jurusan Budidaya Perikanan dan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.

Bagi Hasil Bukan Pajak	112.289.000.000.00	114.717.313.404.28	102.16	2.428.313.404.28
<b>Jumlah Seluruh Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	<b>125.629.533.333.00</b>	<b>130.653.077.881.28</b>	<b>104.00</b>	<b>5.023.544.548.28</b>
Pos Dana Alokasi umum	203.816.476.000.00	203.816.476.000.00	100.00	-
<b>Lain-Lain Penerimaan yang Sah</b>				
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.800.000.000.00	2.437.974.642.96	135.44	637.974.642.96
<b>Penerimaan Lain-Lainnya</b>				
Sisa Kelebihan Pembayaran Gaji	14.090.873.324.00	14.090.873.324.00	100.00	-
<b>Jumlah Seluruh Penerimaan</b>	<b>367.672.107.326.00</b>	<b>374.057.471.828.52</b>	<b>101.74</b>	<b>6.385.364.502.52</b>

Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat dan dijelaskan bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2001, yaitu jumlah seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang dalam target ditentukan sebesar Rp.15.934.298.504.40, ternyata dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 16.658.143.815.68 atau mencapai sebesar 104.54% lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh pencapaian realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 2.177.853.000.00, akan tetapi dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.705.862.888.00 atau mencapai 124.24% lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Pajak Daerah adalah

iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Begitu pula Retribusi Daerah yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 10.941.805.000.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 11.263.521.437.55 atau mencapai 102.94% lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Retribusi Daerah merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Umum, Retribusi Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Berbeda dengan Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-Lain Pendapatan. Realisasi Bagian Laba Usaha Daerah mencapai sebesar Rp. 116.562.270.13 atau mencapai 96.70% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 120.539.504.40. Bagian Laba Usaha Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari laba usaha daerah seperti Bank Pembangunan Daerah, Laba dari Perusahaan daerah serta dari Bank Perkreditan Rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pencapaian Bagian Laba Usaha Daerah untuk realisasi Bank Pembangunan daerah (BPD) mencapai sebesar Rp. 46.562.270.13 atau mencapai 92.50% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 50.338.504.40. Selain itu, realisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mencapai sebesar Rp. 70.000.000.00 atau mencapai 99.71% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 70.201.000.00. Demikian juga realisasi Lain-Lain Pendapatan mencapai sebesar Rp. 2.572.197.220.00 atau mencapai 95.48% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 2.694.101.000.00. Lain-Lain Pendapatan ini meliputi Hasil Penjualan Barang Milik daerah, Sumbangan Pihak Ketiga, Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang semuanya menunjukkan bahwa perolehan realisasi jauh dari target yang ditentukan atau dengan kata lain target yang sudah ditentukan tidak terealisasi.

Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2001, secara keseluruhan tercapai dan bahkan ada kecenderungan meningkat dengan kata lain realisasi dapat melebihi target yang ditentukan.

Demikian juga dengan jumlah penerimaan seluruh Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 125.629.533.333.00, akan tetapi dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 130.653.077.881.28 atau mencapai 104.00% lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh tercapainya realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai sebesar Rp. 15.935.764.477.00 atau mencapai 119.45% lebih besar dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 13.340.533.333.00. Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan yang diterima dari bagian hasil pajak yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meliputi PBB Sektor Pedesaan/Perkotaan, PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan/Non IHH, PBB Sektor Migas/Pertambangan dan Pembangunan Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat. Selain itu, Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak yang mencapai sebesar Rp. 114.717.313.404.28 atau mencapai 102.16% lebih besar dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 112.289.000.000.00. Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan pendapatan yang diterima dari bagian Pemerintah Pusat dari sumber bukan Pajak seperti PSDA, DBH-SDA, Minyak Bumi, Pemberian Hak atas Tanah Iuran Eksplosis dan Eksplorasi serta pungutan Pengusaha Pertanian. Dengan demikian, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2001 dari penerimaan Hasil Pajak dan Bukan Pajak dapat tercapai dan bahkan ada kecenderungan meningkat dengan kata lain realisasi dapat melebihi target yang ditentukan.

Lain-Lain Pendapatan	4.074.393.456.80	3.883.215.983.32	95.31	(191.177.473.48)
<b>Jumlah Seluruh Penerimaan PADS</b>	<b>18.757.687.963.09</b>	<b>19.599.954.257.82</b>	<b>104.49</b>	<b>842.266.294.73</b>
Bagi Hasil Pajak	20.857.465.452.00	21.141.064.161.00	101.36	283.598.709.00
Bagi Hasil Bukan Pajak	114.399.217.159.00	99.951.887.218.30	87.37	(14.447.329.940.70)
<b>Jumlah Seluruh Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	<b>135.256.682.611.00</b>	<b>121.092.951.379.30</b>	<b>89.53</b>	<b>(14.163.731.231.70)</b>
<b>Pos Dana Alokasi umum (DAU)</b>				
Dana Alokasi umum	203.820.000.000.00	203.820.000.000.00	100.00	-
Dana Penyeimbangan	800.345.000.00	723.668.750.00	93.42	(76.676.250.00)
<b>Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>				
Dana Reboisasi	6.576.960.000.00	6.576.960.000.00	100.00	-
<b>Jumlah Dana Penyeimbangan</b>	<b>211.197.305.000.00</b>	<b>211.120.628.750.00</b>	<b>99.96</b>	<b>(76.676.250.00)</b>
<b>Lain-Lain Penerimaan yang Sah</b>				
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.300.000.000.00	3.434.376.805.99	149.32	1.134.376.805.99
Pajak Kendaraan Bermotor-BBN-KB	1.946.700.000.00	2.147.850.000.00	110.33	201.150.000.00
<b>Jumlah Lain-</b>	<b>4.246.700.000.00</b>	<b>5.582.226.805.99</b>	<b>131.45</b>	<b>1.335.526.805.99</b>

realisasinya mencapai sebesar Rp. 121.092.951.379.30 atau mencapai 89.53% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh perolehan realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak yang mencapai sebesar Rp. 99.951.887.218.30 atau mencapai 87.37% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 114.399.217.159.00. Kecilnya perolehan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak ini dikarenakan oleh DBH-SDA Minyak bumi, Pemberian Hak Atas Tanah, Iuran Eksplorasi Eksploitasi dan Pungutan Pengusaha Pertanian yang semuanya menunjukkan bahwa perolehan realisasinya jauh dari target yang sudah ditentukan, dengan kata lain target yang ditentukan tidak terealisasi. Namun dilihat dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang mencapai sebesar Rp. 21.141.064.161.00 atau mencapai 101.36% lebih besar dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 20.857.465.452.00. Besarnya perolehan realisasi Bagi Hasil Pajak ini dikarenakan PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan/Non IHH dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang semuanya menunjukkan bahwa perolehan realisasi melebihi target yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, jumlah penerimaan Dana Penyeimbangan yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 211.197.305.000.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 211.120.628.750.00 atau mencapai 99.96% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh perolehan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Dana Reboisasi, yaitu mencapai 100.00% terhadap target. Sedangkan dilihat dari Dana Penyeimbangan yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 800.345.000.00, namun perolehan realisasinya sebesar Rp. 723.668.750.00 atau mencapai 93.42% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan.

Disamping itu, jumlah Lain-lain Penerimaan Yang Sah yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 4.246.700.000.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 5.582.226.805.99 atau mencapai 131.45% lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 2.300.000.000.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 3.434.376.805.99 atau mencapai

149.32% lebih besar dari target yang sudah ditentukan dan Pajak Kendaraan Bermotor-BBN-KB yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 1.946.700.000.00, namun perolehan realisasinya sebesar Rp. 2.147.850.000.00 atau mencapai 110.33% lebih besar dari target yang sudah ditentukan.

Dengan demikian, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2002, secara keseluruhan baik jumlah penerimaan baik PADS, Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Penyeimbangan dan jumlah Lain-Lain Penerimaan Yang Sah mencapai realisasi sebesar Rp. 392.643.355.441.02 atau mencapai 97.02% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 404.705.969.822.00. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya target penerimaan yang sudah ditentukan tidak terealisasi. Disamping itu, apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2001 dapat dikatakan menurun, namun secara nominal jumlah PAD tahun anggaran 2002 dapat dikatakan jauh lebih besar dibanding PAD tahun anggaran 2002.

### 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2003

Tabel 3.20

#### Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2003

URAIAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH KURANG
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	13.135.356.281.00	11.483.254.199.87		
Pajak Daerah	4.540.000.000.00	5.313.846.895.00	117.05	773.846.895.00
Retribusi Daerah	11.589.985.000.00	11.112.035.017.00	95.88	(477.949.983.00)
Bagian Laba Usaha Daerah	3.892.580.153.00	3.529.680.153.00	90.68	(362.900.000.00)
Lain-Lain	4.128.145.465.00	2.972.140.905.72	72.00	(1.156.004.559.28)

Pendapatan				
<b>Jumlah Seluruh Penerimaan PADS</b>	<b>24.150.710.618.00</b>	<b>22.927.702.970.72</b>	<b>94.94</b>	<b>(1.223.007.647.28)</b>
Bagi Hasil Pajak	26.661.973.354.00	32.682.558.103.00	122.58	6.020.584.749.00
Bagi Hasil Bukan Pajak	125.503.599.015.00	116.182.119.499.00	92.57	(9.321.479.516.00)
<b>Jumlah Seluruh Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	<b>152.165.572.369.00</b>	<b>148.864.677.602.00</b>	<b>97.83</b>	<b>(3.300.894.767.00)</b>
<b>Pos Dana Alokasi umum</b>				
Dana Alokasi umum	185.890.000.000.00	185.890.000.000.00	100.00	-
<b>Pos Dana Alokasi Khusus</b>				
Dana Reboisasi	10.016.352.000.00	16.046.073.000.00	160.20	6.029.721.000.00
<b>Jumlah Dana Penyeimbangan</b>	<b>195.906.352.000.00</b>	<b>201.936.073.000.00</b>	<b>103.08</b>	<b>6.029.721.000.00</b>
Pinjaman dari Bank	18.500.000.000.00	-	-	(18.500.000.000.00)
Lain-Lain Penerimaan yang Sah	36.671.968.284.00	35.793.850.187.00	97.61	(878.118.097.00)
<b>Jumlah Lain-Lain Penerimaan yang Sah</b>	<b>36.671.968.284.00</b>	<b>35.793.850.187.00</b>	<b>97.61</b>	<b>(878.118.097.00)</b>
<b>Jumlah Seluruh Penerimaan</b>	<b>440.529.959.552.00</b>	<b>421.005.557.959.59</b>	<b>95.57</b>	<b>(19.524.401.592.41)</b>

Dari tabel 3.14 di atas dapat dilihat dan dijelaskan bahwa target dan realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2003, yaitu

jumlah penerimaan seluruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 24.150.710.618.00, akan tetapi dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 22.927.702.970.72 atau mencapai sebesar 94,94% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh tercapainya realisasi Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-Lain Pendapatan lebih kecil dari target yang sudah ditentukan atau dengan kata lain target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut tidak tercapai. Namun dilihat dari Penerimaan Pajak Daerah yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 4.540.000.000.00, akan tetapi dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 5.313.846.895.00 atau mencapai 117,05% lebih besar dari target yang sudah ditentukan.

Selanjutnya jumlah penerimaan seluruh Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 152.165.572.369.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 148.864.677.602.00 atau mencapai 97,83% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh tercapainya realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak yang mencapai sebesar Rp. 116.182.119.499.00 atau mencapai 92,57% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 125.503.599.015.00. Namun dilihat dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang mencapai sebesar Rp. 32.682.558.103.00 atau mencapai 122,58% lebih besar dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 26.661.973.354.00.

Berbeda dengan jumlah penerimaan Dana Penyeimbangan yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 195.906.352.000.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 201.936.073.000.00 atau mencapai 103,08% lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Hal ini diindikasikan oleh tercapainya realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Dana Reboisasi lebih besar dari target yang sudah ditentukan atau dengan kata lain target Dana Penyeimbangan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat tercapai bahkan terealisasi melebihi target yang sudah ditentukan.

Disamping itu, pinjaman dari bank yang ditargetkan sebesar Rp. 18.500.000.000.00, namun dalam realisasinya tidak tercapai sama sekali dan jumlah Lain-lain Penerimaan Yang Sah yang dalam target ditentukan sebesar Rp. 36.671.968.284.00, namun dalam realisasinya mencapai sebesar Rp. 35.793.850.187.00 atau mencapai 97.61% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan. Dengan demikian, target dan realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2003, secara keseluruhan jumlah penerimaan baik PADS, Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Penyeimbangan dan jumlah Lain-Lain Penerimaan Yang Sah mencapai realisasi sebesar Rp. 421.005.557.959.59 atau mencapai 95.57% lebih kecil dari target yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 440.529.959.552.00.

#### **4. Pembahasan**

Dalam upaya Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah maupun mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah terdapat dua alat utama (*measures*) yang tersedia bagi pemerintah daerah *policy measures* dan *administrative measures*. Kedua alat ini bekerja di sisi yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi dan saling menguatkan. Namun demikian, perancangan kebijakan dan upaya administratif yang tidak sinkron akan mengakibatkan keadaan yang justru berakibat negatif bagi daerah sendiri. Suatu kebijakan yang dibuat tidak akan mencapai hasil bila kemampuan administratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak tersedia.

*Policy Measures* adalah langkah langkah Pemerintah Daerah dengan mengandalkan kebijakan yang berupa penerbitan ketentuan ketentuan Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan menyangkut beberapa masalah pokok seperti obyek pajak, subyek pajak dan tarif pajak. Disamping itu kekayaan daerah yang dipisahkan dan kebijakan mengenai sumber daya alam juga merupakan bagian dalam *policy measures* pemerintah daerah dalam rangka PAD.

Dalam hal obyek pajak, maka pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah Daerah menetapkan mengenai pajak yang berbasis transaksi maupun pajak yang berbasis kebendaan. Dalam menentukan obyek pajak yang dapat

dipajaki tentu saja tidak bisa dilepaskan dari konstrain yang ada. Konstrain utama dalam menetapkan obyek yang akan dipajaki untuk memperoleh PAD adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dimana telah ditetapkan bahwa sumber-sumber pajak propinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman. Sedangkan pajak-pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Melihat koridor yang tersedia di atas sebenarnya memberi peluang yang cukup luas dalam menggali dan meningkatkan PAD, terutama bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Namun demikian, disamping jenis pendapatan daerah yang diatur, pemerintah daerah juga masih dibatasi oleh koridor kriteria pajak daerah yakni; bersifat pajak dan bukan retribusi, obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat, potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Peraturan Daerah juga menetapkan subyek pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Subyek pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah akan menentukan mengenai pembayar atau wajib pajak, penanggung pajak maupun entitas yang diminta membantu Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan pajak (*collecting agent*), misalnya hotel dan restoran dalam hal Pajak Pembangunan I. Mengingat wilayah yang merupakan yurisdiksi pemerintah daerah dalam memungut pajak sangat dibatasi, maka tidak lagi dapat dilakukan pemajakan secara langsung kepada subyek pajak atau penanggung beban pajak, terutama bila subyek pajak berdomisili di luar yurisdiksi pemerintah suatu daerah.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada maka celah yang tersedia adalah menggunakan subyek pengganti, misalnya hotel dan restoran serta penyelenggara hiburan sebagai *collecting agent* (agen pemungutan) yang selanjut menyetorkan ke Kas Daerah. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung atas para agen pemungut ini. Tentu saja pilihan semacam ini menimbulkan problema administrasi tersendiri, dimana Dinas Pendapatan harus dapat melakukan *assessment* terhadap kegiatan para agen ini. Mengenai administrasi akan dibahas tersendiri dalam *Administrative measures*.

Hal ketiga yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan daerah adalah Tarif Pajak dan Retribusi Daerah. Tarif dapat berupa prosentase tertentu atau dapat juga berupa jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar. Tentu saja, perubahan tarif adalah cara yang paling mudah untuk meningkatkan PAD. Dengan asumsi bahwa hal lain tidak berubah, maka otomatis kenaikan tarif akan menaikkan pendapatan pemerintah daerah, hal ini sering tidak berjalan linier. Disamping itu, isu tarif pajak adalah suatu isu yang paling tidak populer dalam perancangan kebijakan, terutama ketika pajak tidak lagi dikaitkan dengan kondisi individual masyarakat. Masalah tarif pajak, selain sering menimbulkan debat politik berkepanjangan antar legislatif dan eksekutif, juga sering menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai suatu administrasi publik, penerapan tarif pajak menuntut suatu analisis mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi dan politik serta upaya sosialisasi yang keras sebelum diberlakukan.

Pemahaman mengenai *policy measures* sebagai alat untuk mengendalikan PAD ini membawa kita pada pemahaman yang bisa saja menyesatkan. Yaitu pengertian bawa upaya penggalian potensi maupun upaya dalam memperoleh PAD dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan merubah tarif pajak, memperluas obyek pemajakan maupun memperluas definisi subyek pajak dari suatu yurisdiksi pemerintahan daerah. Dipandang dari segi peraturan perundang-undangan yang mengikat pemerintah daerah, disatu sisi ada kebebasan untuk menggali, namun disisi lain ada pembatasan yang bersifat kualitatif. Melihat hal-hal tersebut diatas maka yang diperlukan adalah kemampuan pemerintah daerah

untuk dapat mengidentifikasi obyek-obyek ataupun kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah dan melakukan perancangan kebijakan pemajakannya berdasarkan kriteria yang sah. Tentu saja agar kebijakan yang dirancang dapat efektif perlu dipertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti :

### **1. *Policy Measures* (Ketentuan Kebijakan) Sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Demokratis.**

Masyarakat telah memberikan partisipasi politiknya melalui lembaga pemilihan umum, partisipasi politik rakyat tersebut memberi legitimasi kepada hadirnya lembaga legislatif demikian pula lembaga eksekutif. Pada gilirannya apa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh interaksi antara kedua lembaga ini akan mencerminkan seberapa besar kepentingan para konstituen menjadi agenda utama pemerintah. Keinginan pemerintah daerah untuk memberikan layanan masyarakat akan tercermin dalam sisi belanja dari APBD, karena Belanja Daerah sesungguhnya mencerminkan kegiatan pemerintah daerah. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah daerah atas amanat tugas yang diembannya pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengeluaran anggaran.

Partisipasi publik, diiringi oleh kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk partisipasi dalam pembiayaan anggaran berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, menggunakan *policy measures* sebagai alat pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD (yang berarti memungut pajak dari rakyat) seharusnya tercermin pula di sisi belanja sebagai pertanggungjawaban moral atas pajak yang dipungut dari masyarakat.

### **2. *Administrative Measures* (Ketentuan Administrasi)**

Alat lain yang dapat dan perlu untuk dilaksanakan dalam upaya mengoptimalkan dan menggali potensi PAD adalah langkah-langkah administratif. Langkah ini berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah daerah, terutama

di bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, sumberdaya manusia.

Organisasi pemerintah daerah yang mengemban tugas pengumpulan pendapatan daerah, haruslah dibentuk sedemikian rupa agar ia efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Sebagai suatu organisasi ia harus dapat diandalkan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak meimbulkan biaya transaksi tambahan. Singkatnya organisasi yang dibangun dengan berorientasi kepada pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikelola dengan pertanggungjawaban yang baik, punya kredibilitas dan akuntabilitas tinggi.

Sistem dan prosedur pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah dibuat harus jelas, transparan dan memberikan kemudahan dan kepastian bagi pembayar pajak. Biaya kepatuhan (*compliance cost*) harus dapat ditekan dengan cara membuat sistem dan prosedurnya jelas. Dengan demikian terhindar suatu keadaan dimana 'biaya untuk menjadi patuh' lebih mahal dari pada 'biaya untuk menjadi tidak patuh'. Dari hal ini nampak bahwa kebijakan yang dipilih haruslah dibuat dalam satu paket dengan pengaturan mengenai sistem dan prosedur yang menyangkut implementasi kebijakan. Pada gilirannya sistem dan prosedur yang dibangun adalah alat pelaksanaan akuntabilitas publik yang baik.

Sistem informasi adalah suatu faktor penunjang yang tidak dapat dihindari, pemerintah daerah harus mempunyai asesmen atas semua informasi yang dibutuhkan baik dalam perancangan kebijakan maupun dalam implementasinya. Dalam hal pendapatan daerah, sistem informasi yang tersedia harus dapat memberikan asesmen terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, maupun informasi untuk kepentingan pengukuran baik rencana maupun pelaksanaannya.

Faktor terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah faktor sumber daya manusia. SDM yang tersedia harus dapat ditingkatkan kemampuannya dan rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan standar kapabilitas yang memadai. Dalam banyak hal keberhasilan maupun kegagalan sangat sering disebabkan oleh faktor SDM.

Dalam jangka pendek untuk dapat meningkatkan PAD memang cukup dengan menggunakan *policy measures*, akan tetapi dalam jangka panjang dan

untuk menjamin kesinambungannya (*sustainability*) maka *administrative measure*, harus menjadi agenda utama. Apa bila kegiatan perekonomian suatu daerah dalam keadaan baik, maka permasalahan yang dihadapi hanyalah masalah yang berkaitan dengan *taxing capacity* yaitu kemampuan administrasi pemerintah daerah untuk dapat mengkonversi potensi pajak menjadi pendapatan untuk kas daerah. Bila *taxing capacity* tidak dibangun dengan serius, maka kebijakan apapun yang dibuat tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.

Hal lain yang perlu dikembangkan adalah membangun kapasitas (*capacity building*) baik disisi masyarakat maupun di sisi pejabat publik. Masyarakat perlu diajak untuk melihat pengeluaran (Belanja Pemerintah Daerah) secara transparan sehingga nampak korelasi antara partisipasi finansial dalam bentuk membayar pajak dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tercermin dalam anggaran daerah. Pejabat publik pun perlu dibangun kapasitas administratifnya melalui peningkatan mutu SDM dan pembelajaran (*learning*) yang membentuk paradigma atau kerangka pikir yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat.

### **3. *Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.***

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Memperluas basis penerimaan**  
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- **Memperkuat proses pemungutan**

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

- Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan *taxing power* Daerah antara lain melalui pengalihan sepenuhnya beberapa pajak Pusat kepada Daerah (artinya daerah sepenuhnya menetapkan basis pajak, tarif maupun administrasi pemungutannya), pengalihan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Daerah dan lain-lain kebijakan *sharing tax* dan *piggy backing system*. Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. PBB dan BPHTB dapat dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (*tax-base*) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut,

meskipun untuk sementara waktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pasal 25/Pasal 29 Orang Pribadi yang sekarang dibagihasikan kepada Daerah dapat dialihkan dalam bentuk *Opsen* atau *piggy back*, dimana Daerah seyogyanya diberikan kewenangan mengenakan *opsen* sampai dengan batas tertentu dibawah wewenang penuh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

#### **D. Deskripsi Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir.**

##### **1. Konsep Pariwisata**

Berbagai batasan atau definisi tentang pariwisata yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan keahlian masing-masing. Pandit ( 1990 : 29 ) mengemukakan pariwisata sebagai salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan standarhidup serta menstimulasi sector-sector lainnya. Selanjutnya sector yang kompleks, ini juga meliputi industri-industri yang klasik

seperti kerajinan tangan dan cenderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Sementara itu, menurut Splance bahwa pariwisata menyangkut manfaat pendidikan kebudayaan dan sosial juga mempunyai arti yang lebih penting dari segi ekonomi ( misalnya devisa ). Karena itu, banyak negara berpendapat bahwa pariwisata merupakan salah satu factor penting dalam ekonomi nasionalnya dan dianggap sebagai "*Invisible Export*".

Hari Karyono ( 1997 : 15 ) memberikan dua definisi pariwisata yaitudefinisi yang bersifat umum dan definisi yang lebih teknis. Definisi pariwisata yang bersifat umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Sedangkan definisi pariwisata yang bersifat teknis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok didalam wilayah sendiri atau di negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan jasa dan factor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pariwisata dapat dikatakan fenomena budaya. Dari sisi wisatawan itu sendiri, ditambahkan bahwa hal tersebut terkait dengan motivasi perjalanannya yang meliputi aspek-aspek budaya antara lain :

- a. Ingin melihat adat-istiadat bangsa dinegaralain
- b. ingin melihat upacara adat, upacara keagamaan dan upacara tradisioanal bangsa lain.
- c. Ingin melihat pertunjukan kesenian, festival seni, festival tari, festivsal nyanyi, dan festival drama klasik.
- d. Untuk keperluan studi kebudayaan masyarakat yang masih mempunyai kebudayaan primitif atau tradisioanal dan langka.
- e. Mengunjungi benda-benda bersejarah, monumen, peninggalan nenek moyang, candi serta hasil budaya lainnya.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pasal 1, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Dari pengertian tersebut terkandung istilah wisata, yang memiliki arti kegiatan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata ( segala sesuatu menjadisasaran wisata ).

Berkenaan dengan pembangunan pariwisata, maka kegiatan pembangunan pada umumnya menyangkut pemberdayaan sumber daya alam. Sumber daya alam beserta lingkungannya ini merupakan suatu system ekologi yang memberikan manfaat bagi manusia. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya alam, terlihat peran manusia dalam pengelolaannya dengan mengusahakan kesinambungan produksi serta pelestariannya.

Setiap wilayah pada dasarnya memiliki potensi daya tarik yang handal dengan panorama yang menarik dan memiliki karakteristik yang spesifik untuk dikembangkan sebagai objek wisata dengan variasi beberapa jenis kegiatan wisata. Dalam pengembangan pariwisata baik untuk suatu tujuan nasional dan daerah dapat dilaksanakan dalam wujud pengelolaan dan penataan untuk mengekspresikan keindahan alam serta karakteristik budaya. Dalam kensekuensi yang lebih baik terdapat kecendrungan dalam meningkatkan tingkat perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang di antaranya peran sector pariwisata yang dapat berfungsi sebagai katalisator untuk mngembangkan pembangunan sector lain yang dikoordinir secara terpadu.

Adapun dalam pelaksanaannya, criteria appun yang menjadi tujuan pengembangan suatu objek wisata, lazimnya berpedoman pada prinsip layak sosial ekonomi, layak teknis, dan layak lingkungan.

Dengan demikian, pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang bernilai secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan dibidang Pariwisata.

## **2. Tujuan Pariwisata**

Mariyah ( 1986 : 2 ) mengemukakan ada tiga hal pokok tujuan pariwisata yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industri-industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan kebudayaan alam dan kebudayaan Indonesia
- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Bab II, pasal 3, penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### 5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Mengingat kepariwisataan adalah kegiatan manusia, perorangan maupun kelompok, maka hal-hal yang menunjang kegiatan ini adalah promosi, akomodasi serta fasilitas lainnya yang selalu berhubungan dengan wisatawan. Dengan demikian, membicarakan pariwisata selalu meningkatkan dengan ciri dasar pariwisata itu sendiri, yaitu sejumlah komponen yang dapat menimbulkan sebab dan akibat bilamana fasilitas-fasilitas yang diperlukan tidak memehuni baik oleh wisatawan maupun bagi penerima.

Berdasarkan uraian tentang tujuan pariwisata sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya tujuan pariwisata dapat lebih diperluas lagi, antara lain: pariwisata ziarah, pariwisata safari, pariwisata alam, pariwisata untuk menyaksikan festival atau pagelaran seni budaya, dan sebagainya.

### 3. Potensi Objek wisata

yang dimaksud dengan objek wisata ( Tourist Object ) menurut ( M.Ngefenan, 1991 ) dalam buku A. Hari Karyono ( 1997 : 7 ) adalah : “Segala objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya, misalnya keadaan alam, bangunan sejarah, kebudayaan dan pusat rekreasi”.

Sedangkan dalam kamus istilah pariwisata, menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan objek wisata antara lain sebagai berikut :

- Objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisata.
- Objek wisata alam, adalah objek yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam

- Objek wisata budaya, adalah objek yang daya tariknya bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksikesenian, dan objek lain yang berkaitan dengan kebudayaan.
- Objek wisata bahari/ tirta, adalah kawasan perairan yang dapat digunakan baik untuk rekreasi maupun untuk kegiatan olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas antara lain :

1. Menyelam ( skin diving )
2. Berselancar ( surfing )
3. Berenang
4. memancing
5. mendayung sampan dsb.

Satu hal yang perlu disadari ialah bahwa potensi alam dan peninggalan sejarah masa lalu yang dimiliki suatu daerah, baru akan merupakan bahan baku yang masih memerlukan pengolahan. Ibarat suatu proses produksi, agar dapat menjadi barang jadi yang segera dapat dipasarkan, harus diikutsertakan unsure-unsur produksi seperti modal, tenaga kerja dan keahlian yang ada. Di lain pihak harus pula dipikirkan bagaimana produk yang telah siap dipasarkan itu dapat dibeli oleh wisatawan.

Sementara itu yang terpenting diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi wisata untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial harus memenuhi tiga syarat seperti yang dikemukakan oleh Yoeti ( 1996:178 ) yaitu sebagai berikut :

1. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut sebagai "*something to see*". Artinya, di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksiwisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan perkataan lain, daerah itu harus mempunyai daya tarik yang khusus, di samping itu harus pula

mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “*entertainments*” bila orang datang kesana.

2. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to do*”. artinya ditempat tersebut banyak yang dapat disaksikan dan dilihat, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat itu.
3. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*”. Artinya, di tempat itu harus tersedia tempat berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh dan kenang-kenangan.

#### 4. **Pemanfaatan Wisata Bahari Indragiri Hilir.**

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat, adapun menurut Purwadarminta (1991 : 630 ), manfaat berarti guna, faedah. Sedangkan menurut badudu dan zain (1994 : 858 ), pemanfaatan berarti “hal, cara, hasil kerja memanfaatkan “. Memanfaatkan disini menurut Badudu dan zain (1994 : 858 ). Berarti” membuat sesuatu menjadi berguna, memakai sesuatu supaya bermanfaat.

Wisata tirta atau wisata bahari adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan laut atau suber air tawar yang didalamnya termasuk air terjun, danau, perahu sewa selancar air, parasailing, ski air, jet sky.

Pengawasan yang ketat terhadap konserpasi harus dilakukan khususnya terhadap penggunaan lingkungan bawah laut, seperti pelarangan pengambilan ikan-ikan hias, terumbu karang, pengawasan terhadap jangkar-jangkar dari perahu atau motor boat serta pengawasan limbah.

Secara umum, wisata bahari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi seperti menyelam, berperahu, dan memancing. Sampai saat ini, kegiatan pemanfaatan wisata bahari di Desa Sungai Bela berupa menyelam, berenang, dan berperahu. Hal ini dapat dimengerti oleh karena pemanfaatan wisata bahari masih merupakan kegiatan yang

tergolong baru di Desa Sungai Bela, namun sebenarnya merupakan kegiatan yang mampu menunjang sector pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir.

## 5. Wisatawan :

Dalam *The United Nationon Cutom Formalitie For The Temporary Importation of Pripate Road Motor Vehice Ind Tourism*, dalam pasal 1 ayat

1. ( A.Hari Karyono, 1997:20), dikatakan bahwa :

*Istilah wisatawan harus diartikan sebagai seorang, tanpa membedakan kelamin, bahasa, dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadn perjanjian yang lain daripada negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu krang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, didalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut untuk tujuan non imigran yang legfal seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alas an keluarga, tudi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.*

Sedangkan pengertian wisatawan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat (1) dan (2) :

1. *Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegitan tersebut yang untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.*
2. *Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata dilakukan secara sukarelaserta bersafat sementara*

Menurut Hari Karyono, ( 1997 : 21 ) wisatawan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat perjalanan dilakukan sebagai berikut :

### a. Wisatawan Asing ( Foreign Tourist )

*Orang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia biasanya*

*tinggal. Wisatawan asing tersebut juga wisatawan mancanegara atau disngkat wisman.*

b. Domestic Foreign Tourist

*Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata diwilayah negara dimanaia tinggal.*

c. Domestic Tourist

*Seorang warga negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya.*

d. Indigenous Foreign Tourist

*warga negara suatu negara tertentu, yang karenatugasnya atau jabatannya berada diluar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.*

e. Transit Tourist

*Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan suatu negara tertentu dan terpaksa mampir atau singgah pada suatu Pelabuhan/Airport/Stasiun bukan atas kemauannya sendiri.*

f. Business Tourist

*Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, bukan wisata, tetapi perjalanan wisata yang akan dilakukannya setelah tujuannya utamanya selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.*

## **E. Pengembangan Pariwisata Indragiri Hilir.**

### **1. Kewenangan Sektor Pariwisata**

Dalam arah kebijakan ini pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk :

1. Membangun dan menggali potensi pariwisata sehingga kegiatan pariwisata tersebut dapat digunakan sebagai salah satu kegiatan ekonomi.
2. Melestarikan, menata, dan memelihara objek-objek pariwisata, yang tidak hanya terdiri dari objek pemandangan alam tetapi juga meliputi objek-objek kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan objek-objek lainnya.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pariwisata melalui usaha penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat sadar wisata, sehingga dapat meningkatkan kegiatan dan kualitas pariwisata Indragiri Hilir.
4. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk mendorong pembangunan daerah sehingga pengembangan kegiatan pariwisata dapat merangsang pembangunan sektor-sektor lainnya.

Selanjutnya disebutkan bahwa sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pengembangan sektor pariwisata ini di Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- a. Menguntungkan secara ekonomis, baik finansial maupun kesempatan kerja.
- b. Mengurangi dampak sosial yang negatif tetapi mampu merangsang perkembangan proses sosial guna meningkatkan harkat warga masyarakat Indragiri Hilir.
- c. Merangsang perkembangan kehidupan dan kreatifitas budaya masyarakat.

- d. Melayani kebutuhan kreasi dan pemanfaatan waktu luang yang sehat bagi masyarakat Daerah.
- e. Meningkatkan saling pengertian antar bangsa, antar daerah.
- f. Meningkatkan wawasan pengetahuan dan kajian.
- g. Tidak mengorbankan segi keamanan dan ketahanan sosial.
- h. Menekan seminimal mungkin kerusakan lingkungan untuk mempertahankan keselarasan ekologi lingkungan.
- i. Tetap menjunjung tinggi nilai Adat, Budaya, dan Religius.

## 2. Visi Yang Ingin Diwujudkan

Untuk mengetahui visi terhadap pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir, maka diketahui dari rencana strategis dari Kantor Kebudayaan Seni dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut : **“MEMBANGUN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT”**

## 3. Misi Yang Ingin Dicapai

Dari latar belakang masalah analisis ini telah dijabarkan berbagai persoalan, potensi dan kendala yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan sektor Pariwisata yang dimilikinya, dan melalui elaborasi dokumen dan program yang ingin dikembangkan oleh Kantor Kebudayaan Seni dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat ditemukan misi yang ingin dicapai dalam pengembangan sektor pariwisata ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan dalam roda perekonomian daerah yang pada mulanya adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.
2. sektor pariwisata dapat dijadikan salah satu komponen penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Meningkatkan mutu produk wisata dan mewujudkan cerita pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir melalui promosi yang berkesinambungan pada kegiatan pameran, brosur, penyuluhan kepada para pelaku bisnis atau industri pariwisata.
4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.
5. peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi tulang punggung dan penunjang pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan.

## **F. Strategi**

### **1. Pendekatan Program**

- a. Pendekatan Terpadu
- b. Pendekatan Sinerji

### **2. Pendekatan Action**

- a. Pendekatan Kuantitatif (jumlah kunjungan wisata)
- b. Pendekatan Kualitatif (peningkatan mutu objek wisata)

## **G. Analisis Lingkungan Eksternal**

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari analisis SWOT, maka fenomena lingkungan eksternal perlu dikemukakan untuk memperoleh details dan dimensi yang nantinya berguna untuk mengetahui faktor ancaman yang datang dari lingkungan eksternal maupun peluang yang diberikan oleh lingkungan eksternal itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor-faktor eksternal yang perlu dan strategis diperhitungkan adalah faktor politik yang terjadi, perkembangan faktor ekonomi, perkembangan dan kondisi sosial yang terjadi dimasyarakat, dan yang terakhir adalah perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi pada lingkungan eksternal itu.

Aspek politik mencangkup perkembangan lingkungan politik yang ter jadi dalam hal ini menyangkut kebijakan – kebijakan politik yang terkait langsung

dengan proses pembangunan yang terjadi di daerah, baik berupa produk undang-undang komitmen politik, maupun kemampuan politik elit-elit dipusat dan di daerah. Demikian juga perkembangan interaksi politik yang terjadi dengan segala akibat dan dampak yang terjadi di permukaan. Dimensi politik ini akan berdampak atau menghasilkan suatu konsekuensi sebagai peluang ataupun sebaliknya sebagai ancaman.

Melihat perkembangan akhir-akhir ini, setelah arus reformasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia, maka implikasi yang terjadi adalah masa penyesuaian atau transisi dari suatu kondisi masyarakat yang sebelumnya terkadang menjadi masyarakat yang memiliki kebebasan. Kebebasan politik yang terjadi saat ini banyak melahirkan situasi yang menjurus pada kebebasan yang tidak berlandaskan hukum, sehingga kekacauan atau kerusuhan hampir melanda semua bagian di Wilayah Indonesia.

Secara nasional kerusuhan telah terjadi mulai dari kerusuhan di Ambon (Maluku), di Sambas (Kalimantan barat), di Mataram (Nusa Tenggara Barat),

Adapun dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah pelaksanaan ekonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya dalam daerah kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina pemerintah atau pihak pihak lain seperti badan Otorita, Kawasan Perumahan, Kawasan Industri, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Pariwisata, dan sebagainya berlaku ketentuan daerah otonomi.

Selain dengan proses pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang didalamnya telah mengatur penyerahan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, dengan penekanan pada daerah Kabupaten dan Kota, maka daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi pariwisata yang ada secara mandiri dan berkesinambungan.

Aspek ekonomi berhubungan dengan keterkaitan ekonomis sektor pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir pada mekanisme pasar dengan daerah

sekitarnya atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini perkembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir dianggap bersaing melalui mekanisme pasar wilayah lainnya dalam merebut pangsa pasar wisatawan, (Wisman dan Wisnu) melalui tarik-tarik proses nilai jual objek wisata, pesona dan antraksi wisata yang ada.

Pada aspek ekonomi secara keseluruhan di Indonesia, memang terlihat bahwa kinerja perekonomian nasional belumlah memadai akibat krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan itu sejak tahun 1997, namun bagaimanapun juga sektor pariwisata masih tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik, baik dari indikator kunjungan wisatawan maupun perkembangan para pelaku ekonomi yang berada nasib di sektor pariwisata ini.

Sementara itu sektor pariwisata juga dikelola oleh daerah atau kota lain disekitar Kabupaten Indragiri Hilir, berpotensi menjadi tantangan bagi sektor pariwisata di Indragiri Hilir, seperti Pantai Solop dan Objek Wisata lainnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 1*  
*Objek dan Daya Tarik Wisata*  
*Kabupaten Indragiri Hilir*

No	Nama Wisata	Daya Tarik
1.	Pantai Solop	Panorama Laut
2.	Pantai Tanjung Jungkir	Panorama Laut
3.	Pantai Senyum	Panorama Laut
4.	Bukit Berbunga	Panorama Darat
5.	Telaga Mablu	Riset
6.	Air Terjun 86	Pemandian Alami
7.	Kunang-Kunang & Mangruf	Riset
8.	Bukit Condong	Riset
9.	Benda Cagar Budaya	Sejarah
10.	Danau Pangkoh Concong	Danau
11.	Bukit Sari Intan Teluk Belengkong	Panorama

12.	Air Terjun Tembulan Rusa	Air Terjun
13.	Wisata Agro Pulau Burung	Sungai/Kanal

#### H. Analisis Lingkungan Internal

Dalam analisis lingkungan internal yang akan menjadi titik perhatian adalah tiga aspek utama yaitu sumber daya apakah yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir dalam sektor atau industri pariwisata, strategi apa sajakah yang berkompeten, dalam hal ini pemerintah kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kantor Kebudayaan Seni dan Pariwisata, dan yang terakhir adalah kinerja apasajakah yang telah dicapai selama ini.

Sarana Angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir belum memadai dengan jumlah trayek sebagai berikut :

No	Jalur Trayek	Kebutuhan	Realisasi
1.	Kecamatan Kemuning	Aspal Batu	Pengerasan
2.	Menuju Objek Wisata	Pengerasan	Jalan Setapak
3.	Menuju Tanjung Jungkir	4 Buah Jembatan	Jalan Setapak
4.	Transfortasi Laut	1 Unit Kapal Wisata	Rencana 2007 Usulan APBN

Jumlah Akomodasi sebagai sarana penunjang bagi aktivitas wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai mana tergambar pada tabel berikut ini :

*Tabel*  
*Daftar Nama Hotel/Losmen Menurut Jarak*  
*Fasilitas di Kabupaten Indragiri Hilir*  
*Tahun 2007*

No	Nama : Hotel/Penginapan/Wisma	Pelabuhan Udara	Pelabuhan Laut	Ket
	Telaga Puri	15	2	
	Tembilahan Pratama	15	1	
	Inhil Pratama	15	1	
	Arrahman Hotel	15	1	
	Indah Sari	15	1	
	Kemuning Muda	15	1	
	Gemilang Hotel	15	1	
	Hotel Auliai	15	1	

**I. SOT Kantor**

Adapun isu-isu stratejik yang ditemukan dari analisis dengan menggunakan Matriks SWOT adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan 13 Objek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir melalui pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) dengan harapan menimbulkan komitmen dan alokasi dana bagi kegiatan atau program pengembangannya. Adapun 22 Objek itu sesuai dengan klafisikasi perkembangan 22 objek wisata alam itu yakni pertama sebagai objekwisata yang telah dikeloladan suddah berkembang meliputi : Pantai Solop kedua sebagai objek wisata yang belum tertata namun sudah berkembang meliputi: Pantai Senyum dan Bukit Berbunga, ketiga sebagai yang berpotensi belum dikelola dan belum berkembang meliputi: Wilayah Kemuning, Sei Belah dan Guntung.
2. Mengintegrsikan aktivitas pariwisata yang dilakukan dan dikelola oleh pusat pariwisata terpadu daripara pengembang skala besar dengan

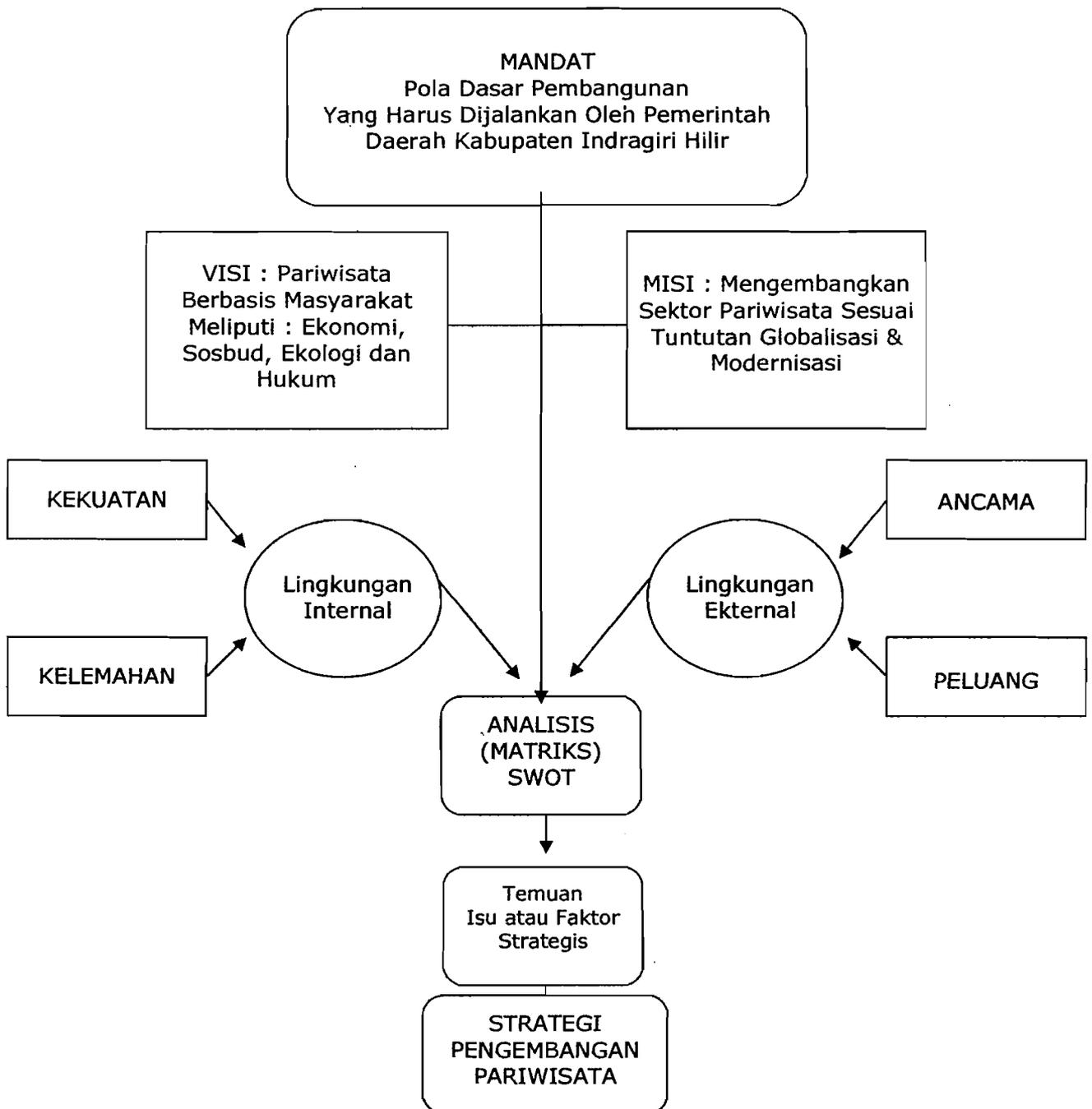
atrasi kesenian daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki ciri khas tersendiri.

3. Melakukan promosi keseluruhan paket wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, baik objek wisata alam, Kesenian Budaya, kerajinan dan paket wisata yang dimiliki oleh para pengembang, yang dapat dikoordinasikan dengan Sub Kantor Kebudayaan seni dan Pariwisata sebagai organisasi pemerintah yang berkompeten.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang secara langsung mendukung aktivitas wisata, seperti lahan parkir, pembuatan taman, toilet, tempat duduk di taman, dan lain-lain, program ini dapat direalisasikan melalui dana yang diperoleh dari retribusi dan pajak langsung dikenakan dalam rantai nilai (Value Chain) aktivitas pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir secara menyeluruh.
5. Terdapat tekanan dari beberapa kelompok masyarakat atas objek wisata yang terbentuk kafe atau tempat hiburan yang sejenis (bar atau singing hall), yang dianggap tidak sesuai dengan norma keagamaan yang dianutnya.
6. Melibatkan manajemen para pengembang skala besar untuk ikut bersama mengembangkan dan meningkatkan skill sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir yang terlibat dalam kegiatan atau bisnis pariwisata secara profesional dan terlatih.
7. Pengadaan toko khusus yang memasarkan barang-barang souvenir (cindramata) hasil dari pengrajin Indragiri Hilir, dengan mengikut sertakan investor dari pihak swasta dengan cara mempermudah ijin operasional dan kemudahan lainnya sehingga ada daya tarik tersendiri.
8. Pemberdayaan kinerja organisasi Kantor Kebudayaan Seni dan Pariwisata secara menyeluruh dengan melakukan diagnosa dan intervensi, agar kinerja Kantor Kebudayaan Seni dan Pariwisata dapat bergerak secara cepat, tepat dan berdaya guna. Hal ini disebutkan oleh tuntutan perubahan jaman yang menumbuhkan kinerja organisasi yang masih menggunakan paradigma lama untuk dilayani, bukan sebaliknya

melayani dengan menciptakan prestasi yang nyata dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan skill, baik keterampilan manajerial maupun teknologi yang ada. Seperti kemampuan menghasilkan paket program komputer yang dapat membantu mempercepat pekerjaan yang ada.

9. Mengatasi persoalan ketertiban dan keamanan, terutama untuk menangkal isu-isu agama dan nilai yang positif berlaku di masyarakat, maka perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Kantor Kebudayaan Seni dan Pariwisata Indragiri Hilir dengan para pemuka masyarakat dan tokoh agama yang ada sehingga perkembangan apapun yang ada sehingga perkembangan apapun yang ada di masyarakat dapat dimonitor dan diantisipasi secara dini.
10. Mendekatkan dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat akan fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan cara setiap aktivitas pariwisata perlu melibatkan masyarakat lokal sekitarnya, sehingga terjadi nilai tambah (value added) yang dirasakan masyarakat baik penambahan atau peningkatan pendapatan maupun proses sosialisasi pada aktivitas pariwisata yang ada.
11. Pengamanan wilayah objek wisata dengan membuat peraturan daerah sebagai jbaran Undang-undang tentang kepariwisataan nomor 13 tahun 1990. (Inhil dalam angka Tahun 2002.)

**Bagan 3.5**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber : Penyesuaian Konsep Bryson & Roering (John M. Bryson, 1988:59)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor penting dan perlu mendapat perhatian yang serius, karna dalam sektor Pariwisata tidak ada masa kadaluasannya berbeda dengan sektor minyak dan gas bumi yang memiliki takaran dan kurun waktu tertentu akan dapatkan masa habisnya.
  
2. Suatu konsekuwensi yang logis, pada sektor kepariwisataan sebagai sektor handalan selain dari minyak dan gas bumi, dapat memberikan kontribusi semangat masyarakat terutama dibidang sosial ekonomi dan budaya daerah. Kemudian dapat pula menimbulkan kemampuan daya saing masyarakat dalam menggesa proses kemajuan yang diharapkan. Kepariwisata dapat pula mendorong kegairahan bekerja karena terjadinya proses akulturasi budaya sosial dan membuka peluang lapangan kerja baru bagi penduduk dan tenaga kerja tempatan didalam melakukan aktivitas ekonomi sosial dan kebudayaan beserta adanya semangat untuk menumbuh kembangkan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungannya didalam upaya memelihara ekosistem wisata yang kondusif. Seiring dengan itu program pengembangan pariwisata tetap berdasarkan tatanan ekologi, ekonomi, sosial budaya dan hukum, dimana prinsip ini telah dituangkan didalam misi dan visi pariwisata kabupaten indragiri hilir. Kawasan Wisata Tanjung Bakung khususnya salah satu kawasan wisata

bahari diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kawasan ini berdasarkan hasil survey lapangan telah mendapatkan beberapa data yang sangat mendukung untuk dikembangkan sebagaimana layaknya objek wisata laut yang berada dikawasan lain luar Indragiri Hilir. Pada kawasan ini terdapat potensi wisata yang khas unik dan memberikan maknait turism lokal maupun mancanegara. Karena memiliki hutan mangruf yang cukup luas dapat menjadikan kawasan ini sebagai objek riset mangruf. Kemudian disini juga terdapat panorama danau yang unik yakni dikawasan sekitar danau adalah lautan besar air asin, tetapi disekitar danau terdapat air tawar dan jernih dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Potensi lain adalah terdapat Flora dan Fauna cukup alami yakni Burung Bangau Putih dan Buaya Danau. Pada jenis-jenis tumbuhan hutan terdapat berbagai jenis tumbuhan yang tidak terdapat pada hutan lain, seperti pinang merah, merantih, dan cangkir monyet, serta rotan. Pada giografis kawasan ini sangat strategis karena berdekatan dengan selat malaka sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata mangruf. Berdasarkan yang demikian itu, maka dapat rumuskan bahwa:

3. Penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Indarigiri hilir sejak tahun 2001 berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten indragiri Hilir Nomor 34 Tahun 2001, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan telah mengacu kepada Undang-undnang No.9 Tahun 1990 baik dari dimensi asas dan tujuan,penyelenggaraan dengan berperinsip pada

pelestarian, daya guna, perluasan berusaha dan mendorong pendapatan asli daerah khususnya dibidang kepariwisataan.

4. Danau Tanjung Bakong adalah suatu kawasan baru ditemukan sejak tahun 2006, sampai saat ini kawasan ini belum maksimal untuk diberdayakan sebagai kawasan unggulan, sedangkan potensinya dirasa sangatlah unik dan bernilai tinggi apalagi bila dikaitkan dengan peranan untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat tempatan yang terletak di sekitar desa Sungai Bela kecamatan Concong. Namun kondisi kawasan yang jauh dengan masyarakat, hutan mumi dan berada dikawasan mangruf, maka kawasan ini belum berfungsi sebagaimana mestinya didalam mensejahterakan masyarakat.

5. Adapun yang menjadi hambatan didalam pengembangan kepariwisataan secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

5.1. Imprasutruktur kepariwisataan. Yakni Indragiri Hilir adalah wilayah yang sebagian besar terdiri dari sungai-sungai, laut dan pulau hanya satu kecamatan yang berada pada kawasan perkotaan. Objek Wisata di Kabupaten Indragiri Hilir sebahagian besar terdapat pada kawasan sungai, Laut dan pulau. Oleh karena itu imprasutruktur yang menyangkut dengan transportasi tentunya melalui laut atau sungai dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Begitu pula dengan sarana air, listrik dan sarana sandar tambat kapal memakan biaya yang relatif tinggi.

- 5.2. Partisipasi pihak ketiga belum ada, karena pengembangan infrastruktur dasar belum memadai.
  - 5.3. Sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat masih memerlukan perhatian sungguh-sungguh oleh pemerintahan setempat, baik tingkat pendidikan formal, penyuluhan sadar wisata dan perilaku budaya tempatan juga sangat tinggi artinya bagi perkembangan sector kepariwisataan.
6. Upaya-upaya untuk mengatasinya adalah:
- 6.1. Aktif didalam rapat koordinasi lintas sektoral antara pusat, propinsi dan daerah.
  - 6.2. Pendekatan dan strategi terpadu, sinergi dan berkesinambungan.
  - 6.3. Rencana pengembangan kawasan dengan detail rencana pada setiap kawasan yang memiliki potensi.
  - 6.4. Tapal batas kawasan untuk menciptakan rasa aman.

## **B. Saran-saran**

1. Berdasarkan kajian ini diharapkan dapat menambah perhatian masyarakat dan pemerintah untuk membangun kawasan wisata bahari wilayah pulau tanjung bakung. Perencanaan dan pengembangan kawasan tanjung bakung agar senantiasa memperhatikan aspek kelestarian, kontinuitas dan keterpaduan pada sektor-sektor terkait.

Pengembangan Kawasan Tanjung Bakung dapat kiranya menimbulkan motifasi baru khususnya bagi masyarakat tempatan didalam memacu diri untuk bersaing dengan daerah lain.

Pengembangan Kawasan Tanjung Bakung yang lebih utama adalah memprioritaskan kepada basis kemasyarakatan yakni ekologi, ekonomi, sosial budaya dan peranan hukum.

Pengembangan kawasan wisata Tanjung Bakung agar dapat melibatkan pranan masyarakat untuk lebih ditonjokan baik sebagai pelaku pengembangan maupun untuk menjaga kelestarian alam.

2. Agar pengembangan Wisata Bahari bertumpu kepada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan. Agar Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri hilir senantiasa memberikan rangsangan kepada masyarakat agar mereka berperan aktif untuk memelihara dan memanfaatkan kawasan ini sebagai penunjang akses pariwisata. Upaya Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran harus lebih ditingkatkan melalui penggunaan media cetak, elektronik seperti Internet.
3. Agar dana operasional dalam anggaran belanja daerah lebih memperhatikan terutama pada sektor pengembangan kawasan wisata tanjung bakung. Dalam upaya pengamana kawasan seharusnya Dinas Kebudayaan Seni dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir dapat berkerja sama dengan Dinas Instansi dan Masyarakat terutama untuk menangkal kemungkinan adanya penebang liar ,pemburu Buaya dan Burung migrant.Kelestatريان alam adalah kunci utama ndahnya kawasan wisata

terutama kawasan Tanjung Bakung. Semoga Tulisan ini dapat memberikan kontribusi moral terhadap pengembangan kawasan wisata Mangruf Danau Tanjung Bakung,dan dapat memberikan kontribusi dibidang perekonomian masyarakat disekitar Tanjung Bakung.

4. Pengembangan wisata bahari sangat diperlukan didalam menopang tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arkunto, Suharsimi, 1996 *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
2. Arkunto, Suharsimi, 1998 *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
3. Asyari, Sapari Imam, 1981, *Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
4. Badudu, Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
5. Faried, Ali, 1997, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, Raja Grafindo, Jakarta.
6. Gary, Yuki, 1998, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Prenhallindo, Jakarta.
7. Hadi, Sutrisno, 1991, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Jogjakarta
8. Hari, Karyono, 1997, *Kepariwisataaan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
9. Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
10. Jauch, Lawrence R and Willian F. Glueck,, 1988, *Business Policy and Strategic Management*, Fourth edition, Mc Graw-Hill International, USA.
11. Kripendor, J, 1976, *Marketing a Tourism*, Los Angeles.
12. Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
13. Mariah, Emiliana, et. All, 1985/1986, *Partwisata*, PT BP Denpasar.
14. Merpaung, Happy, 2000, *Pengetahuan Keparawisataaan*, Alfabeta, Bandung.
15. Moekijat, 1994, *Koordinasi*, Mandar Maju, Bandung.
16. Moleong, Lexy j. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
17. Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Parawisata di Indonesia*, PT. Kokoh Gunung Agung, Jakarta.
18. Nasution, S, 1988, *Metodology Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito. Bandung.
19. Nazir, Moh, 1998. *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

20. Pandit, 1990, *Ilmu Parawisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya, Jakarta.
21. Profil Pelaksanaan *Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan: Pokok-pokok Pikiran dan Implementasinya*, 2001 Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Luwu.
22. Purwadarmita W. J. S, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
23. Santoso, Sastropoerto, 1998, Partisipasi Komunikasi, *Persuasi dan disiplin dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
24. Sedarmayanti dan Syafruddin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
25. Sihite, Richard, 2000, *Tourism Industry*, SIC, Surabaya.
26. Sugiyono, 1998, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
27. Spalance, James, 1987, *Ekonomi Parawisata Sejarah dan Prosesnya*, Kanisus, Bandung.
28. Yoeti, Oka A, 1966, *Pemasaran Parawisata*, Angkasa, Bandung.
29. Yoeti, Oka A, 1996, *Pengantar Ilmu Parawisata*, Angkasa Bandung.
30. Yoeti, Oka A, 1997, *Perencanaan Pengembangan Parawisata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
31. Keterangan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004.
32. Undang – undang Nomor 09 tahun 1990 tentang Keparawisataan.
33. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
34. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
35. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
36. Peraturan Daerah No. 32-34 Tahun 2002 tentang Parawisata dan Retribusi Parawisata Daerah.

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**  
**K E P A R I W I S A T A A N**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan ;
  - b. bahwa Kepariwisata memiliki peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta kasih tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa ;
  - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah - langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata ;
  - d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang - Undang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN**

**B A B I**

**K E T E N T U A N U M U M**

**Pasal 1**

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan :

1. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
3. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut ;
4. kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahaakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut ;
6. obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata ;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa ;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

## **BAB III**

### **OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA**

#### **Pasal 4**

- (1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri dari atas :
  - a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna ;
  - b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

- (2) Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

#### Pasal 5

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek – obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan social budaya ;
- b. nilai – nilai agama, adat – istiadat, serta pandangan dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat ;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

### BAB IV

## USAHA PARIWISATA

### Bagian Pertama

#### Penggolongan Usaha

#### Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan kedalam :

- a. usaha jasa pariwisata ;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata ;
- c. usaha sarana pariwisata.

### Bagian Kedua

#### Usaha Jasa Pariwisata

#### Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis – jenis usaha :
  - a. jasa biro perjalanan wisata ;
  - b. jasa agen perjalanan wisata ;
  - c. jasa pramuwisata ;
  - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran ;
  - e. jasa impresariat ;
  - f. jasa konsultan pariwisata ;
  - g. jasa informasi pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh bagian usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia ;
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus mendapatkan ijin ;
- (3) Syarat – syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan / atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

#### Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olah raga ;
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai – nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

#### Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

#### Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

### Bagian Ketiga

#### Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 15

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

#### Pasal 16

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dikelompokkan kedalam :
  - a. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam ;
  - b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya ;

- c. pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap – tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.;
- (2) Badan Usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin ;
- (3) Syarat – syarat pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

#### Pasal 18

Pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

#### Pasal 19

Pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

#### Pasal 20

Pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

#### Pasal 21

Pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian lingkungan atau ketertiban dan ketentraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat

#### Usaha Sarana Pariwisata

#### Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis – jenis usaha :
- penyediaan akomodasi ;
  - penyediaan makan dan minum ;

- c. penyediaan angkutan wisata ;
  - d. penyediaan sarana wisata tirta ;
  - e. kawasan pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

#### Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan ;
- (2) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga ;
- (3) Syarat – syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan ;
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas criteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

#### Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri ;
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan dan hiburan.

#### Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya ;
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

#### Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa – jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

#### Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan ;
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengikut sertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan ;
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

#### Pasal 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang kepariwisataan ;
- (2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional.

### BAB VII

#### PENYERAHAN URUSAN